



MODEL PENDIDIKAN DAERAH 3T BERBASIS KEARIFAN LOKAL



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2018

**Model Penyelenggaraan Pendidikan untuk
Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal
yang Mengakomodasi Keberagaman Kondisi
Lingkungan, Sosial, dan Budaya Setempat
(Berbasis Kearifan Lokal)**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018**

Model Penyelenggaraan Pendidikan untuk Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal yang Mengakomodasi Keberagaman Kondisi Lingkungan, Sosial, dan Budaya Setempat (Berbasis Kearifan Lokal)

Tim Penyusun :

Dr. Agus Dudung, M.Pd.
Dr. Ajat Sudrajat, M.Pd.
Dr. Uswatun Hasanah, M.Si.
Dra. Lucia Hermien Winingsih, MA, Ph.D.
Drs. Philip Suprastowo, PU
Ais Irmawati, M.Si.
Nur Listiawati, SS, M.Ed.

ISBN : 978-602-0792-09-5

Penyunting :

Dr. Subijanto, M.Ed.

Penerbit :

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Redaksi :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. +6221-5736365
Faks. +6221-5741664
Website: <https://litbang.kemdikbud.go.id>
Email: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, Desember 2018

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdikbud/Copyright@2018

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakkidbud), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2018 menerbitkan Buku Laporan Hasil Penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2017. Penerbitan buku laporan hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menyebarkan hasil penelitian kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan sebagai salah satu upaya untuk memberikan manfaat yang lebih luas dan wujud akuntabilitas publik.

Hasil penelitian ini telah disajikan di berbagai kesempatan secara terbatas, sesuai dengan kebutuhannya. Buku ini sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dan referensi bagi pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku laporan hasil penelitian ini.



Jakarta, Juli 2018

Kepala Pusat,

Muktiono Waspo

NIP 196710291993031002

KATA PENGANTAR

Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas dan heterogen. Kemajuan dalam pembangunan pendidikan antardaerah juga bervariasi. Pembangunan pendidikan dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain ketersediaan guru, kondisi siswa, ketercukupan sarana prasarana, infrastruktur, ketersediaan dana, serta lokasi atau kondisi geografis daerah. Daerah 3T merupakan daerah yang tingkat pembangunan, termasuk dalam pembangunan pendidikan relatif tertinggal dari daerah lain. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kondisi ini, seperti kondisi geografis, kekurangan sumber daya manusia yang mampu bertahan di daerah sulit, sosial dan budaya, pendanaan, dan kondisi khusus lainnya. Kondisi khusus ini merupakan keunggulan atau kearifan lokal yang harus diperhatikan dalam pembangunan pendidikan.

Studi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis model penyelenggaraan pendidikan untuk daerah 3T yang mengakomodasi keberagaman kondisi lingkungan, sosial, dan budaya setempat. Daerah 3T dengan kondisi khususnya akan mempengaruhi dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga memerlukan model tertentu agar pembangunan pendidikan di daerah 3T berhasil.

Akhir kata, kepada berbagai pihak yang telah memberi masukan dalam penyusunan hasil penelitian ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, November 2017

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Urgensi Penelitian	10
F. Gambaran Produk Hasil Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN <i>ROAD MAP</i>	14
A. <i>Road Map</i> Hasil Penelitian Terdahulu	14
B. Penyelenggaraan Pendidikan	15
C. Lembaga Pendidikan	23
D. Sekolah	24
E. Pendidikan di Daerah 3T	28
F. Program Penyelenggaraan Pendidikan Daerah 3T yang Telah Ada	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Tujuan Penelitian	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian	40
C. Metode Penelitian	40
D. Langkah-Langkah Penelitian	41
E. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Pelaksanaan Sistem Pendidikan di Daerah 3T	44
B. Pembahasan Hasil Penelitian	91
C. Kondisi Satuan Pendidikan di Daerah 3T	96
D. Penilaian Masyarakat	106
E. Pembahasan Hasil Instrumen	113

BAB V KESIMPULAN.....	152
A. Kesimpulan	152
B. Rekomendasi.....	153
DAFTAR PUSTAKA.....	154

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan wilayah yang luas dan heterogen, secara geografis maupun sosiokultural, memerlukan upaya yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan, di antaranya permasalahan pendidikan di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Permasalahan tersebut antara lain yang terkait dengan pendidik, seperti kekurangan jumlah guru (*shortage*), distribusi guru yang tidak seimbang (*unbalanced distribution*), kualifikasi guru di bawah standar (*under qualification*), kurang kompeten (*low competencies*), dan ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu (*mismatched*), angka partisipasi sekolah yang masih rendah, sarana prasarana yang belum memadai, dan infrastruktur untuk kemudahan akses dalam mengikuti pendidikan yang masih sangat kurang. Sebagai bagian dari NKRI, daerah 3T memerlukan upaya peningkatan mutu pendidikan yang dikelola secara khusus dan sungguh-sungguh dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas, agar daerah 3T dengan pengembangan model pembelajaran daerah 3T dapat

memajukan bersama sejajar dengan daerah lain. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengingat daerah 3T memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan nasional dan keutuhan NKRI. Salah satu kebijakan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam rangka percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T adalah Program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia (MBMI). Program ini meliputi: 1) Program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM-3T); 2) Program PPG Terintegrasi dan Kewenangan Tambahan (PPGT); dan 3) Program PPG Kolaboratif (PPG Kolaboratif). Program-program tersebut merupakan sebagian jawaban untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan di daerah 3T. Pendekatan dan model pembelajaran dimaksudkan untuk membantu mengatasi kekurangan guru dalam memberikan materi pembelajaran, sekaligus mempersiapkan guru profesional yang tangguh, mandiri, dan memiliki sikap peduli terhadap sesama, serta memiliki jiwa pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa, agar dapat maju bersama mencapai cita-cita luhur.

Beberapa temuan permasalahan penyelenggaraan pendidikan yang dilansir oleh Kompasiana.com (4 April 2014), utama di

daerah 3T antara lain adalah temuan-temuan yang ditargetkan dalam permasalahan pendidik, seperti kekurangan jumlah (*shortage*) tenaga guru, distribusi guru tidak seimbang (*unbalanced distribution*) untuk setiap daerah, kualifikasi standar masih di bawah standar (*under qualification*), kurangnya kompeten (*low competencies*) guru, serta ketidaksesuaian anantara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang mampu (*mismatched*) oleh guru yang ditugaskan. Permasalahan lain dalam penyelenggaraan pendidikan adalah angka putus sekolah juga masih relatif tinggi, sementara angka partisipasi sekolah masih rendah. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia peningkatan mutu pendidikan di daerah 3T perlu dikelola secara khusus dengan sungguh-sungguh, utamanya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, agar daerah 3T dapat segera maju sejajar dengan daerah lain.

Secara fisik gedung sekolah ini masih kelihatan bagus karena usianya masih relatif muda. Suasana sekitar gedung ini sepi dan sejuk karena di sekelilingnya masih banyak pohon yang rindang. Gedung sekolah memiliki jumlah ruangan yang terbatas; empat ruang kelas, satu ruang guru, satu ruang perpustakaan yang kosong, dan 2 kamar WC. Oleh karena jumlah ruangan kelasnya masih terbatas maka sekolah belum

bisa menyediakan sarana-sarana yang bisa mendukung kegiatan belajar-mengajar di satuan pendidikan itu. Kegiatan belajar-mengajar untuk para siswa/i SMP dibuat sore hari karena pagi harinya ruangan-ruangan kelas yang ada digunakan oleh anak-anak SD. Itu pun, karena ruangan terbatas maka anak-anak SD menggunakan gedung gereja sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan belajar-mengajar.

Faktor pertama adalah penempatan tenaga pengajar yang belum proporsional, karena pengajar yang ada tidak memiliki kualifikasi akademik seperti yang diharapkan oleh sekolah. Akibatnya guru yang mengajar tidak mengikuti proses dan mekanisme penerapan kurikulum yang sebenarnya. Kedua, karena fasilitas pendukung belajar, sekolah belum memiliki buku-buku sumber dan sarana lain seperti laboratorium dan arus listrik yang mendukung kegiatan pembelajaran. Ketiga, untuk pembuatan perangkat dan proses, guru-guru hanya berbuat sebatas apa yang mereka tahu, tanpa mengikuti panduan yang berlaku umum. Ini juga menjadi suatu masalah yang terlihat di sekolah yang ada di daerah 3T.

Semua kondisi dan masalah riil yang ada di daerah 3T menjadi masalah bersama yang menggugah rasa nasionalisme kita untuk mengatasinya. Dalam perspektif ini rasa nasionalisme yang kita bangun terbentuk melalui kesadaran universal dari

seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama memberi prioritas bagi percepatan pelayanan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan di daerah 3T itu. Kita tidak lagi memikul senjata untuk menentang segala bentuk kolonialisme dari luar tetapi kita membangun semangat nasionalisme untuk merasakan dan mengambil sikap konkret dalam meningkatkan mutu pendidikan bagi anak-anak bangsa ini, terutama anak-anak bangsa yang terhimpit dan terlantar di balik deretan bukit dan lembah atau yang berada di daerah yang terisolir dan tertinggal.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan, Dudung (2017) kearifan lokal setiap daerah pada umumnya sudah dikembangkan dalam pembelajaran sekolah. Beberapa cara yang telah dilakukan di antaranya adalah: 1) Dengan cara memperkenalkan dan mengikutsertakan siswa dalam kegiatan yang berkaitan dengan budaya lokal; 2) Menjadwalkan mata pelajaran Mulok kemudian menetapkan guru yang siap mengampu mata pelajaran tersebut; 3) Memberikan contoh kepada siswa dan menyuruh siswa mengamati di lingkungan masyarakat; 4) Pembinaan dan pengamatan di beberapa kegiatan pameran budaya; 5) Siswa membuat makanan tradisional dan dijelaskan oleh guru; 6) Membuat media gambar pada siswa; 7) Mengajak siswa mengikuti kegiatan

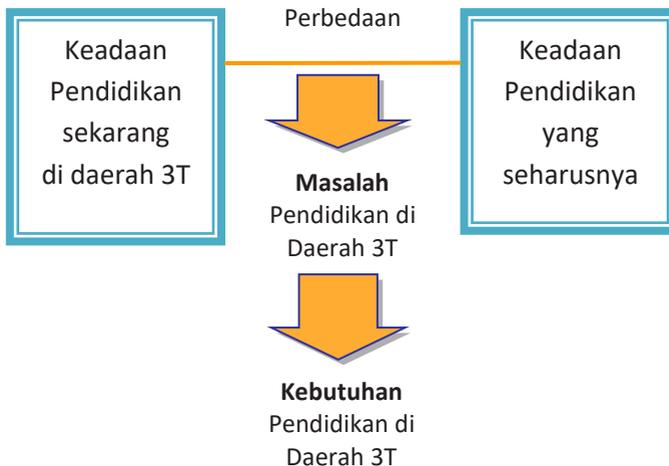
yang berkaitan dengan budaya daerah. Hasil pengamatan dan observasi yang telah dilakukan di beberapa sekolah di daerah 3T, pengembangan kearifan lokal di sekolah belum dicantumkan dalam visi dan misi sekolah sehingga penerapannya pun belum menyeluruh untuk setiap mata pelajaran. Hal ini yang menyebabkan pembelajaran saintifik berbasis kearifan lokal belum dapat dilaksanakan secara serentak.

Dalam pembelajaran berbasis kearifan lokal yang diterapkan belum memiliki tema khusus untuk pembelajaran berbasis kearifan lokal. Untuk mata pelajaran seni budaya dan prakarya pembelajaran berbasis kearifan lokal tergantung pada materi pembelajaran yang ada. Masih terpacunya pada pembelajaran yang ada dalam kurikulum membuat guru kurang kreatif dalam mencari tema-tema yang dapat dikembangkan. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah telah dilakukan dan kegiatan ini merupakan wadah dalam mengangkat kearifan lokal. Pada umumnya guru mengangkat kearifan lokal dalam pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan menari, menyanyi, pemberian keterampilan seperti menganyam dan sebagainya. Adapun pelaksanaannya belum kontinu seperti pelajaran inti, karena kegiatan ekstrakurikuler hanya sebagai penunjang. Adapun kegiatan yang relevan

dalam mengangkat kearifan lokal adalah kegiatan kepramukaan, prakarya, serta kesenian.

Perihal kerja sama yang dilakukan pada sekolah 3T, pentingnya kerja sama antara masyarakat dan sekolah dalam mengembangkan sekolah berbasis kearifan lokal karena sekolah tidak berdiri sendiri melainkan berada di tengah masyarakat. Oleh sebab itu selayaknya masyarakat dan sekolah harus bersinergi. Sekolah menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dalam mata pelajaran tertentu seperti seni budaya dan prakarya dengan melibatkan masyarakat dalam pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk sekolah-sekolah yang belum memiliki SDM yang menguasai adat istiadat dan budaya setempat, khususnya untuk guru-guru yang pendatang. Pada umumnya sekolah mendapat dukungan penuh dari masyarakat karena masyarakat memang menginginkan pembelajaran yang dilakukan anaknya dapat digunakan untuk membantu orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Kerja sama yang dilaksanakan masih sebatas antara sekolah dan masyarakat. Akan lebih baik jika kerja sama lebih diperluas dengan pihak lain yang terkait, seperti perusahaan perkebunan yang ada di wilayah tersebut membantu mengembangkan sekolah berbasis kearifan lokal.

Dari latar belakang masalah tersebut, Berdasarkan *need assessment* “keadaan seharusnya” kondisi ini dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini.



Gambar 1.1 *Need Assessment* Pendidikan di Daerah 3T

B. Rumusan Masalah

Model penyelenggaraan pendidikan untuk Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (D-3T) yang tepat untuk mengakomodasi keberagaman kondisi lingkungan, sosial, dan budaya setempat (berbasis kearifan lokal)?

C. Tujuan Penelitian

Mengembangkan model penyelenggaraan pendidikan untuk Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (D-3T) yang mengakomodasi keberagaman kondisi lingkungan, sosial, dan budaya setempat (berbasis kearifan lokal).

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat digunakan oleh Perguruan Tinggi sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk calon guru yang dapat diterapkan di berbagai daerah dengan berbagai kearifan lokal di Indonesia.
2. Menumbuhkan sikap cinta tanah air, bela negara, peduli, empati, terutama memecahkan masalah kependidikan, dan bertanggung jawab bagi para guru terhadap kemajuan pendidikan.
3. Bahan rekomendasi bagi pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengambil suatu kebijakan terkait sistem penyelenggaraan pendidikan khususnya untuk daerah 3T.

E. Urgensi Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan wilayah yang luas dan heterogen, secara geografis maupun sosiokultural, memerlukan upaya yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan, di antaranya permasalahan pendidikan di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Permasalahan tersebut antara lain yang terkait dengan pendidik, seperti kekurangan jumlah guru (*shortage*), distribusi guru yang tidak seimbang (*unbalanced distribution*), kualifikasi guru di bawah standar (*under qualification*), kurang kompeten (*low competencies*), dan ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diajarkan (*mismatched*), angka partisipasi sekolah yang masih rendah, sarana prasarana yang belum memadai, dan infrastruktur untuk kemudahan akses dalam mengikuti pendidikan yang masih sangat kurang. Daerah 3T memerlukan upaya peningkatan mutu pendidikan yang dikelola secara khusus dan sungguh-sungguh dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pendidikan tersebut di atas, agar daerah 3T dengan pengembangan model penyelenggaraan pendidikan untuk Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (D-3T) yang mengakomodasi keberagaman kondisi lingkungan, sosial, dan budaya setempat, pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah

Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) ini dapat memajukan bersama sejajar dengan daerah lain. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui penelitian ini, perlu dilaksanakan ini sangat urgensi, mengingat daerah 3T memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan nasional dan keutuhan NKRI. Program-program tersebut merupakan sebagian jawaban untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan di daerah 3T. Pengembangan model pendekatan Model Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (D-3T) yang Mengakomodasi Keragaman Kondisi Lingkungan Sosial dan Budaya Setempat (Berbasis Kearifan Lokal) pada jenjang sekolah dimaksudkan untuk membantu mengatasi kekurangan kemampuan guru dalam memberikan materi pembelajaran, sekaligus mempersiapkan guru profesional yang tangguh, mandiri, dan memiliki sikap peduli terhadap sesama, serta memiliki jiwa pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa, agar dapat maju bersama mencapai cita-cita luhur.

F. Gambaran Produk Hasil Penelitian

Model penyelenggaraan pendidikan adalah pedoman berupa program pendidikan atau petunjuk strategi penyelenggaraan

pendidikan yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Pedoman itu memuat tanggung jawab guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran (Eggen dan Kauchak, 1988:9). Salah satu tujuan penggunaan model pembelajaran: untuk meningkatkan kemampuan siswa selama belajar (Joyce B. dan Weil M., 1992:2).



Gambar 1.2 Gambaran Model Penyelenggaraan Pendidikan

Gambaran produk hasil penelitian berbentuk model penyelenggaraan pendidikan untuk Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (D-3T), yang mengakomodasi keberagaman kondisi lingkungan, sosial, dan budaya setempat pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Produk hasil penelitian ini untuk menyiapkan guru dan melihat kesesuaian implementasi yang

dilakukan guru. Penelitian ini menghasilkan suatu model pendidikan yang cocok untuk daerah 3T yang berbasis kearifan lokal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN *ROAD MAP*

A. *Road Map* Hasil Penelitian Terdahulu

<p>Penelitian Terdahulu 2011 Perbedaan Masyarakat Desa Tertinggal melalui Pendekatan Pendidikan, Ekonomi, dan Lingkungan (Oleh Eko Digdoyo, M.Hum. Lemlit UHAMKA, 2011)</p>	<p>Penelitian Terdahulu 2012 Pengembangan Daerah Tertinggal Kabupaten Sampang (Oleh Ovi Resia Arianti Putri dan Eko Budi Santoso. Lemlit ITS, 2012)</p>
<p>Penelitian Terdahulu 2013 Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Seni Budaya di SMA Kabupaten Lombok Timur, NTB (Oleh Jien Tina Rahayu, Trie Nartiti Retnowati (IKIP Mataram dan UNY)</p>	<p>2017 (Rencana Penelitian) Model Penyelenggaraan Pendidikan untuk Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal yang Mengakomodasi Keberagaman Kondisi Lingkungan, Sosial, dan Budaya Setempat (Berkas Kearifan Lokal)</p>

Gambar 2.1 *Road Map* Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T sudah banyak dilaksanakan oleh para ahli terdahulu, berdasarkan hasilnya pun banyak juga temuan-temuan yang bisa dijadikan dasar pengembangan untuk model penyelenggaraan pendidikannya.

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk membantu mengatasi kekurangan guru, sekaligus mempersiapkan calon guru profesional yang tangguh, mandiri, dan memiliki sikap peduli terhadap sesama, serta memiliki jiwa untuk mencerdaskan anak bangsa, agar dapat maju bersama mencapai cita-cita luhur seperti yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa Indonesia.

B. Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan berjalan beriringan dengan struktur dan kebudayaan sosial masyarakat setempat. Oleh karena itu, pendidikan senantiasa berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan yang akan dituju oleh masyarakat. Bryson mengatakan bahwa, "*environment outside the organization in order to identify the opportunities and challenges the organization faces*",¹ menurutnya lingkungan luar organisasi

¹John M. Bryson, *Strategic Planning, for Public and Nonprofit Organization* (San Fransisco: Jossey Bass, 2001) h. 159.

dalam hal ini lembaga pendidikan dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan organisasi, idealnya dalam hubungan dengan yang berkepentingan untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan pendidikan. Menurut para ahli sosiologi pendidikan, terdapat relasi resiprokal (timbang balik) antara dunia pendidikan dengan kondisi sosial masyarakat. Relasi ini akan berlangsung terus dalam penyelenggaraan pendidikan yang merupakan gambaran dari kondisi yang sesungguhnya dalam kehidupan masyarakat yang kompleks. Demikian juga sebaliknya, kondisi masyarakat, baik dalam aspek kemajuan, peradaban, kebudayaan, sosial, politik, dan sejenis tercermin dalam kondisi dunia pendidikannya. Oleh karena itu, majunya dunia pendidikan juga dapat menjadi cermin terhadap kondisi masyarakatnya. Ahmad menjelaskan, bahwa sistem pendidikan yang dicanangkan dalam sekolah itu berkaitan erat hubungannya dengan berbagai budaya, sistem ekonomi, politik, dan lain sebagainya dalam rangka membina dan mengembangkan masyarakat.² Oleh karena itu pola dan bentuk pendidikan yang berbeda dari satu daerah ke daerah lain karena adanya perbedaan bentuk atau sistem budaya dari masyarakat, karena adanya perbedaan tujuan membentuk anggota masyarakat yang berguna bagi masyarakatnya, bahwa

²Nazii Shaleh Ahmad, *Pendidikan dan Masyarakat* (Yogyakarta: Sabda, 2001), h. 63.

pendidikan itu sebenarnya merupakan bagian dari budaya umum suatu tempat. Saripudin mengatakan, proses pendidikan selalu berlangsung dalam suatu lingkungan, yaitu lingkungan pendidikan.³ Lingkungan ini mencakup lingkungan fisik, sosial, intelektual, dan nilai-nilai. Lingkungan fisik terdiri atas lingkungan alam dan lingkungan buatan manusia yang merupakan tempat dan sekaligus memberikan dukungan dan juga bisa menjadi hambatan bagi berlangsungnya proses penyelenggaraan pendidikan. Demikian juga Nasution mengatakan, bahwa suatu kelompok atau masyarakat menjamin kelangsungan hidupnya melalui pendidikan⁴. Agar masyarakat itu dapat melanjutkan eksistensinya maka kepada anggota mudanya harus diteruskan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan, dan bentuk lainnya yang diharapkan akan dimiliki setiap anggota masyarakat. Tiap masyarakat meneruskan kebudayaannya dengan beberapa perubahan kepada generasi muda melalui pendidikan, melalui interaksi sosial. Dengan demikian pendidikan dapat dikatakan sebagai sosialisasi. Adapun partisipasi masyarakat dalam

³Saripudin, *Interpretasi Sosiologis dalam Pendidikan* (Bandung: Karya Putra Darwati, 2010), h. 34.

⁴Nasution, *Sosiologi Pendidikan* (Bandung: Bumi Aksara, 2015), h. 10.

penyelenggaraan pendidikan menurut Dwiningrum⁵ terbagi atas 2 (dua) bentuk, yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Sedangkan Rodliyah mengatakan bahwa komunikasi tentang pendidikan kepada masyarakat tidak cukup dengan informasi verbal saja, tetapi perlu dilengkapi pengalaman nyata yang ditunjukkan kepada masyarakat agar timbul citra positif tentang pendidikan di kalangan mereka, sebab masyarakat pada umumnya ingin bukti nyata sebelum mereka memberikan dukungan (*National School Public Relation Association*).⁶ Bukti itu dapat ditunjukkan berupa pameran hasil produk sekolah, tayangan keberhasilan siswa, dan lain-lain. Beberapa contoh bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan adalah: 1)

⁵Siti Irene Astute Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 58.

⁶St. Rodliyah, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di Sekolah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 34.

Mengawasi perkembangan pribadi dan proses belajar anak di rumah; 2) Menyediakan fasilitas dan perlengkapan belajar yang dibutuhkan anak dan yang dibutuhkan sekolah untuk kemajuan pendidikan; 3) Memberikan umpan balik kepada sekolah tentang pendidikan; 4) Memenuhi undangan sekolah bila diperlukan; 5) Bersedia menjadi tenaga pelatih/narasumber bila diperlukan sekolah; 6) Ikut memperlancar komunikasi pendidikan; 7) Mengajukan usul-usul untuk perbaikan pendidikan; 8) Ikut memperlancar komunikasi pendidikan; dan 9) Ikut mengontrol jalannya pendidikan. Menurut Kotler yang ditulis oleh Pidarta⁷ merumuskan proses hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat adalah: 1) Identifikasi manusia-manusia kunci di masyarakat; 2) Perhatikan angan-angan dan pikiran mereka terhadap lembaga pendidikan dengan kontak-kontak secara kebetulan; 3) Rumuskan tujuan hubungan lembaga dengan masyarakat yang tepat dengan angan-angan dan pikiran mereka; 4) Nilai efektivitas biaya program itu; dan 5) Implementasikan dan nilai hasilnya. Proses antarhubungan seperti ini ditujukan untuk membuat program tertentu yang sudah nyata dalam waktu yang sudah ditentukan. Menurut

⁷Made Pidarta, *Perencanaan Pendidikan Partisipatori dengan Pendekatan Sistem* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 37.

Rusdiana⁸ ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menggalang partisipasi orang tua dan masyarakat, yaitu: 1) Melibatkan masyarakat dan orang tua secara proporsional dan profesional dalam mengembangkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah/madrasah; 2) Menjalin komunikasi secara intensif berupa kegiatan rapat bersama antara sekolah dan masyarakat. Menurut Ardisasmita⁹ ada beberapa hal yang menghambat atau menjadi ancaman terhadap partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan adalah: 1) Sifat malas, apatis, masa bodoh, dan tidak mau melakukan perubahan dan pembaharuan di tingkat anggota masyarakat; 2) Aspek-aspek topografi (perbukitan dan jurang), geografis, (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya), demografi (jumlah penduduk yang sedikit), ekonomi (desa miskin).

Pada hakikatnya pendidikan merupakan upaya membangun budaya dan peradaban bangsa. Oleh karena itu, UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah terus-menerus memberikan perhatian yang besar pada pembangunan

⁸Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi* (Bandung: Pustaka Seti, 2015), h. 126.

⁹Raharjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 135.

pendidikan dalam rangka mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan memiliki empat pilar utama, yaitu belajar untuk belajar (*learning how to learn*), belajar untuk mengetahui (*learning how to know*), belajar untuk menjadi (*learning how to be*), dan belajar untuk hidup dengan orang lain (*learning how to live together*), akan menciptakan masyarakat terpelajar yang menjadi prasyarat terbentuknya masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan.

Meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T merupakan langkah penting untuk mengokohkan sistem pertahanan nasional di wilayah tersebut melalui pendidikan dan budaya. Peningkatan akses pendidikan di daerah 3T akan menghapus stigma kesenjangan politik nasional mengenai peningkatan sumber daya dan infrastruktur, juga menjadikan warga di daerah 3T merasa menjadi bagian dari negara Indonesia.

Dalam rangka peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, terus pula dilakukan peningkatan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan termasuk melalui penyediaan guru bantu, penyediaan materi bahan ajar terutama buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, penguatan pendidikan kecakapan hidup dan penataan hubungan lembaga pendidikan dengan dunia industri dan dunia usaha. Minat dan bakat

peserta didik dikembangkan melalui berbagai kegiatan kesiswaan termasuk lomba-lomba karya ilmiah dan olimpiade, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Sebagian dari penyelenggaraan pendidikan di Indonesia menghadapi persoalan dari segi letak geografis yang tidak menguntungkan, bencana alam, serta masalah sosial ekonomi dan kultur. Pendidikan masih jauh dari yang diharapkan baik dari ketersediaan buku, kualitas guru, proses belajar-mengajar, absensi guru, dan sebagainya. Itulah fenomena pendidikan yang terjadi di daerah 3T.

Persoalan pendidikan hanya dapat diatasi jika kita juga fokus mengatasi persoalan utama, bagaimana manajemen pendidikan mampu memenuhi standar pelayanan minimum sesuai yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Dalam perkembangannya, penyelenggaraan pendidikan di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), menghadapi kompleksitas tersendiri mulai dari bagaimana menyediakan tenaga pendidik yang berkualitas, berlangsungnya pendidikan dengan kualitas yang terjamin, sampai pada pemerataan akses pendidikan.

Kendatipun kita tidak membeda-bedakan, namun dalam kenyataan penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T akan selalu tertinggal. Mendatangkan guru ke daerah 3T tidak

semudah yang kita duga sekalipun banyak insentif yang disediakan. Rata-rata guru di daerah 3T yang tidak berasal dari daerah tersebut tidak siap menghadapi kondisi daerah apalagi tidak sama dengan latar belakang kultural di mana mereka tumbuh dan besar.

C. Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan merupakan sesuatu yang dapat digunakan sebagai tempat terjadinya proses belajar. Dalam proses belajar terjadi proses perubahan dari sesuatu yang tidak atau kurang baik menjadi lebih baik, yang merupakan gambaran interaksi manusia antara akal pikiran dengan segala kemampuan yang ada di dalam dirinya, baik kemampuan fisik, insting, hati nurani maupun akal pikiran manusia itu sendiri. Alam semesta sebagai salah satu tempat terjadinya proses pendidikan menyediakan berbagai macam ragam dan jenis bahan pelajaran, mulai dari binatang, planet, bumi, air, tanah, hutan, sampai pada ekosistem tempat habitat kelompok manusia hidup. Pendidikan di dalam lingkungan masyarakat pada dasarnya merupakan proses interaksi manusia dalam suatu komunitas untuk bertingkah laku maupun bekerja sama dalam mencapai tujuan yang lebih baik. Proses pendidikan yang terjadi di dalam lingkungan yang telah direkayasa

merupakan suatu lembaga, yang disebut sekolah. Bentuk lembaga pendidikan yang ada kebanyakan merupakan bagian dari sistem sekolah, apakah sekolah negeri ataupun sekolah swasta. Masyarakat dewasa ini menjadi semakin kompleks, pluralistik, dan beragam, yang merupakan tantangan terhadap gagasan tentang kultur nasional, gagasan tentang bagaimana mengarahkan orientasi dan mengorganisir aktivitas pendidikan, dan harapan-harapan terhadap persekolahan. Keragaman bahasa, budaya, dan perbedaan etnis tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat dan isu religiositas tengah muncul sebagai suatu faktor penting. Semua faktor tersebut menunjuk perbedaan antara kebutuhan pendidikan yang spesifik dari masyarakat lokal dan berbagai pendekatan terbaik mana yang diambil untuk mencapai kebutuhan tersebut. Pengambilan keputusan pendidikan strategis, harus melibatkan dan mempertalikan tiga tingkatan yang berbeda yaitu perspektif global, kepentingan lembaga, dan kebutuhan kelompok lokal.

D. Sekolah

Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal, secara sistematis merencanakan bermacam-macam lingkungan pendidikan yang menyediakan berbagai kesempatan bagi

peserta didik untuk melakukan berbagai kegiatan belajar. Ini berarti bahwa sekolah itu merupakan suatu lembaga yang diselenggarakan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang sesuai untuk pelaksanaan proses belajar-mengajar yang dalam pengertian umum sering disebut dengan pendidikan.

Lembaga pendidikan yang paling representatif adalah sekolah, karena di dalam lembaga sekolah segala sesuatu baik materi yang diajarkan, pengajar, siswa, sistem, dan metode pengajaran maupun tempat pembelajaran direkayasa sedemikian rupa untuk tujuan pendidikan. Perencanaan tersebut disusun dalam bentuk pengajar dan siswa, kurikulum, penjenjangan, metode pengajaran, aturan dan tata tertib sekolah, fasilitas pembelajaran sampai pada gedung tempat pembelajaran itu sendiri. Semua direncanakan dan direkayasa sedemikian rupa dengan tujuan berhasilnya proses pendidikan.

Di samping segala macam unsur-unsur persekolahan tersebut, suatu lembaga sekolah biasanya memiliki visi dan misi pembelajaran. Visi dan misi pembelajaran pada lembaga pendidikan sekolah inilah yang akan menjadi penentu perencanaan dan perancangan lembaga sekolah yang akan dibentuk.

1. Bentuk Sekolah

Konsep sekolah menurut bentuknya dibedakan dalam tiga kelompok: a) Sekolah formal; b) Sekolah nonformal; dan c) Sekolah informal. Sekolah formal adalah lembaga pendidikan yang dijadikan standar baku oleh suatu negara. Sekolah nonformal adalah lembaga pendidikan yang tidak dijadikan standar baku, bersifat komplementer, insidental, dan kadang bersifat kejuruan atau spesifik. Sedangkan sekolah informal adalah lembaga pendidikan yang terjadi di dalam keluarga, tetapi kadang juga diartikan sebagai pendidikan di dalam masyarakat.

2. Status Sekolah

Secara umum sekolah menurut statusnya dibedakan dalam dua kelompok, yaitu: a) Sekolah negeri; dan b) Sekolah swasta. Sekolah negeri adalah sekolah yang sepenuhnya ditangani oleh pemerintah, mulai dari pengadaan prasarana, sarana, kepegawaian, anggaran belanja, dan seterusnya. Sedangkan sekolah swasta adalah sekolah yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak swasta. Yang dimaksud dengan swasta adalah individu atau sekelompok individu nonpemerintah.

3. Jenis Sekolah

Dari segi jenisnya sekolah dibedakan dalam 3 bentuk; yaitu: a) Sekolah umum; b) Sekolah kejuruan; dan c) Sekolah luar biasa. Sekolah umum adalah sekolah yang ditujukan untuk semua golongan masyarakat dan mencakup semua bidang studi ilmu. Bidang studi yang dikaji juga bermacam-macam bentuk dan jenisnya membentang dari filsafat sampai dengan teknologi. Sekolah umum biasanya tidak berorientasi pada keahlian dan kemampuan khusus yang wajib dimiliki siswa. Sekolah ini cenderung mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Sekolah kejuruan adalah sekolah dengan orientasi pembelajaran pada studi ilmu tertentu yang spesifik. Sekolah kejuruan menekankan pada fungsi dan nilai guna studi ilmu tertentu. Umumnya terkait dengan kebutuhan sumber daya manusia atau tenaga kerja dalam bidang tertentu dan dengan kemampuan yang spesifik pula.

4. Jenjang Sekolah

Jenjang sekolah biasa disebut dengan jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan bagi sekolah formal bersifat baku, yaitu: a) Jenjang anak usia dini (TK/PG/TPA); b) Jenjang Sekolah Dasar (SD/MI); c) Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs); d) Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK/MAK); dan e) Jenjang Perguruan Tinggi (PT/Akademik/Politeknik). Menurut Muliawan, dalam dataran normatif pendidikan anak usia dini diperuntukkan anak usia 3-5 tahun, SD/MI bagi anak usia 5-6 tahun dengan lama pendidikan 6 tahun. SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/MAK masing-masing untuk anak usia antara 12 dan 16 tahun dengan lama pendidikan 3 tahun, sedangkan untuk perguruan tinggi untuk anak usia 18 ke atas dengan jenjang pendidikan bervariasi dari 3,5 tahun sampai 5 tahun untuk Strata 1. Di dalam Perguruan Tinggi sendiri dibedakan dalam tiga tingkatan, yaitu: Strata 1 (S-1), Strata 2 (S-2), dan Strata 3 (S-3/Doktor).

E. Pendidikan di Daerah 3T

Berbeda dengan masyarakat perkotaan pada umumnya yang

telah menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Pada masyarakat Dayak di daerah 3T, kesadaran menyekolahkan anak masih rendah, pandangan atau pemikiran mereka sangat sederhana yaitu sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan komunitasnya. Mata pencaharian sebagai petani dan ladang berpindah membutuhkan banyak tenaga kerja sehingga semua anggota keluarga dilibatkan untuk bercocok tanam dan mengurus perkebunan karet (Biro Pusat Statistik, 2008). Waktu sehari-hari bagi masyarakat di daerah 3T tercurah pada kegiatan mencari nafkah di bidang pertanian, serta pada waktu tertentu mereka menyeberang ke negeri tetangga Malaysia untuk menjual hasil pertaniannya.

Sebagai konsekuensi petani ladang berpindah, bekerja di sektor perkebunan tanaman karet milik rakyat (orang Dayak), dan harus pergi jauh dengan berjalan kaki ke negeri tetangga Malaysia, maka tidak sempat lagi memikirkan pendidikan anak-anaknya. Terkadang anak-anak mereka masih berstatus pelajar di sekolah, akan tetapi pada musim-musim tertentu pada saat berladang atau pada saat mereka harus pergi ke negeri tetangga Malaysia untuk menjual hasil pertaniannya, para orang tua akan mengikutsertakan anak-anak mereka untuk ikut bersama, sehingga apa yang terjadi? Anak-anak mereka

tidak ikut dalam proses pembelajaran di kelas dalam waktu yang lama. Para orang tua lebih memilih anak-anak mereka untuk meninggalkan proses pembelajaran ketimbang berada di dalam kelas agar ketika ujian mendapat nilai yang baik. Padahal sebenarnya penghasilan dari sektor pertanian yang mereka garap menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi dibandingkan dengan penghasilan rata-rata (GNP) Kalimantan Barat, jadi anak-anak masyarakat di daerah 3T untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi mempunyai peluang yang cukup besar.

Ketimpangan kondisi pendidikan yang ada di daerah 3T bukanlah merupakan hal yang baru. “Wajah” pendidikan di daerah 3T sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di kota-kota besar, dan negara tetangga yang lokasinya memang tak begitu jauh dan sangat terlihat jelas. Di Malaysia misalnya, sekolah-sekolah dibangun dengan baik, terkadang dilengkapi asrama siswa. Guru-guru yang dikirim bertugas mengajar di situ adalah guru muda yang cakap mengajar dan diberi gaji yang layak dan pantas.

Bukti empirik seperti yang ditemukan di Desa Nanga Bayan, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Kondisi belajar-mengajar di sana sangat memprihatinkan, di mana guru negerinya hanya empat orang

harus mengajar 150 siswa SMP. Ditemukan juga seorang kepala sekolah yang merangkap sebagai guru mengajar siswa dari kelas 1 s/d kelas 3. Hal ini juga terjadi di beberapa desa yang berbatasan dengan Malaysia seperti di Desa Jasa, Sungai Kelik maupun Desa Rentong. Inilah kondisi nyata pendidikan di daerah 3T dan daerah terpencil serta pedalaman.

Tak banyak memang yang mengetahui atau peduli dengan nasib pendidikan anak-anak di daerah 3T. Banyak anak di daerah 3T Nusantara yang bernasib malang karena tak dapat memperoleh pendidikan yang bermutu. Di beberapa perkampungan atau dusun di 3T Kalimantan misalnya, anak-anak harus berjalan kaki 1-2 jam sejauh hingga 6 km melintasi hutan dan menuruni bukit untuk mendapatkan pendidikan di sekolah setiap hari. Tidak jarang materi pelajaran terlambat lantaran tidak ada guru yang sesuai dengan latar belakang mengajar.

Berbagai kondisi pendidikan yang ada di daerah 3T tersebut diperparah dengan aksesibilitas menuju ke sekolah buruk sehingga menghambat guru maupun siswa. Mereka harus menyeberangi sungai untuk dapat tiba di sekolah. Butuh waktu lama dan tenaga ekstra karena harus melewati medan yang sulit dan jauh. Selain itu, tenaga pengajar juga terbatas karena tidak banyak yang mau mengabdikan diri sebagai guru di

daerah terpencil dengan akses yang sulit dan gaji yang kurang memadai. Pada beberapa kasus misalnya, untuk mengambil gaji di kota kecamatan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengambil gaji tersebut sangat besar, sama dengan nominal gaji yang ia terima. Sehingga guru tersebut memutuskan untuk mengambil gajinya beberapa bulan sekali karena sulit dan mahalnya medan yang harus ditempuh.

Meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T merupakan langkah penting untuk mengokohkan sistem pertahanan nasional di wilayah tersebut melalui pendidikan dan budaya. Peningkatan akses pendidikan di daerah 3T akan menghapus stigma kesenjangan politik nasional mengenai peningkatan sumber daya dan infrastruktur, juga menjadikan warga di daerah 3T merasa menjadi bagian dari negara Indonesia.

Di samping sarana pendidikan yang sangat terbatas, minat penduduk terhadap pendidikan pun masih relatif rendah. Fenomena ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk daerah perbatasan yang meninggalkan desa untuk bersekolah namun tidak menamatkan sekolahnya. Beberapa permasalahan pendidikan yang sering dijumpai di daerah perbatasan adalah: 1) Masih tingginya angka putus sekolah; 2) Banyak anak yang terpaksa tidak sekolah sebagai akibat ekonomi orang tua yang tergolong tidak mampu, korban trafiking, korban narkoba dan

atau HIV/AIDS; 3) Motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak kurang; 4) Fasilitas pendidikan yang sedikit dan relatif jauh dari jangkauan warga. Persoalannya adalah belum ada lembaga yang mampu menampung mereka yang putus sekolah. Oleh karena itu, perlu adanya pelayanan khusus yang akses ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau sehingga dapat membantu persoalan-persoalan di atas melalui pendidikan nonformal terutama peserta didik usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun seperti; guru kunjung, mobil pintar, perpustakaan keliling, sekolah satu atap, sekolah berasrama, perahu pintar, kelas berjalan, kelas kecil, dan bentuk bentuk lain pembelajaran yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan warga belajar yang belum bisa menjangkau sampai daerah 3T. Jika pembelajaran dan penyusunan kurikulum selama ini berorientasi pada kelas-kelas reguler maka pendidikan di daerah 3T dan perbatasan perlu diambil sebuah kebijakan kurikulum baru yang mengarah pada kecakapan hidup (*life skill*) yang dapat dijadikan mata percaharian pokok peserta didik setelah tamat. Muatan pendidikan karakter secara psikologis mencakup dimensi moral *reasoning*, moral *feeling*, dan moral *behaviour* (Lickona, 1991).

Model ini merupakan salah satu alternatif untuk melayani pendidikan yang tidak terjangkau. Oleh karena itu, model

pendidikan menengah layanan khusus “Sekolah Kebangsaan” memberikan porsi penguatan pada *life skill* dalam proses pembelajaran dengan pendekatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah 3T dan perbatasan, sehingga mereka dapat menghasilkan sumber daya manusia profesional yang dapat diandalkan dan unggul untuk menghadapi persaingan global dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia (Anwar, 2004).

Wilayah yang dapat digolongkan sebagai daerah terpencil, harus memenuhi 2 (dua) persyaratan bersifat kumulatif, yaitu: 1) Daerah itu sulit dijangkau karena kekurangan atau keterbatasan prasarana dan sarana angkutan umum, baik darat, laut maupun udara; dan 2) Prasarana dan sarana sosial dan ekonomi tidak tersedia, atau walaupun tersedia tetapi dalam keadaan yang sangat terbatas, sehingga pengusaha yang akan menjalankan usahanya (para penanam modal) harus menyediakan sendiri prasarana dan sarana sosial dan ekonomi.

Selama ini ada anggapan keliru dan terus bertahan dalam jangka waktu yang relatif lama bahwa hanya wilayah perkotaan yang merupakan wajah depan Indonesia. Untuk itu, paradigma terbalik demikian harus diubah bahwa wajah depan Indonesia adalah terlihat dan tercermin di wilayah perbatasan. Selain itu, bentuk usaha percepatan pertumbuhan

perekonomian perbatasan yang berbasis kerakyatan antara lain: 1) Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat/kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang sudah ada; 2) Pemberdayaan, pendampingan, dan penguatan peran serta perempuan dalam kegiatan perekonomian atau sosial; 3) Pengembangan wawasan kebangsaan masyarakat di kawasan perbatasan; 4) Menghidupkan peran lembaga keuangan mikro dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian; dan 5) Identifikasi potensi dan pengembangan sektor-sektor unggulan di daerah perbatasan (Tri Poetranto, 2003).

F. Program Penyelenggaraan Pendidikan Daerah 3T yang Telah Ada

Terkait dengan masalah pemenuhan tenaga pendidik, pemerintah kita (melalui dinas pendidikan) sebenarnya secara khusus telah berusaha melakukan pemenuhan melalui penempatan guru-guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru yang ditempatkan di daerah tertinggal atau terpencil. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak guru yang enggan mengajar di daerah terpencil dengan beragam alasan. Menurut Berg (2006) dalam Riza Diah, AK dan Pramesti Pradna P., salah satu faktor yang menyebabkan keengganan para guru untuk mengajar di daerah terpencil atau tertinggal adalah letak sekolah yang sulit dijangkau.

Alasan berikutnya adalah minimnya fasilitas dan hiburan. Di Indonesia, pada umumnya guru yang mengajar di daerah terpencil tidak betah dikarenakan fasilitas yang tidak memadai. Selain jauh dari pusat keramaian, fasilitas tempat tinggal guru juga tidak dipenuhi oleh pemerintah. Akibatnya banyak guru yang merasa tidak nyaman dan mengajukan pindah ke sekolah yang berada di perkotaan.

Dengan adanya berbagai permasalahan penyelenggaraan pendidikan di daerah tertinggal atau terpencil, seharusnya masalah pelayanan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat luas, melalui berbagai organisasi kemasyarakatan, NGO, dan organisasi lainnya bisa ikut terlibat dalam membantu mengatasi berbagai kekurangan layanan pendidikan di daerah terpencil.

Program-program pemberdayaan serta pengembangan kapasitas dan kompetensi guru, penyediaan sarana prasarana pendidikan, dan lain sebagainya adalah program-program yang bisa dilakukan untuk membantu ketertinggalan pendidikan anak-anak Indonesia di daerah tertinggal atau terpencil. Medco Foundation sebagai salah satu lembaga sosial yang bergerak di berbagai bidang termasuk bidang pendidikan, mencoba berperan lebih aktif dalam membantu mengatasi berbagai masalah ketertinggalan pendidikan di

daerah tertinggal atau terpencil. Bekerja sama dengan unit usaha Medco Group yang lain, Medco Foundation merintis *School Improvement Program* yang berusaha memberikan bantuan penguatan kapasitas dan sistem pendidikan di sekolah-sekolah di daerah tertinggal.

Salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T adalah Program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia (MBMI). Program ini meliputi: 1) Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi dan Kewenangan Tambahan (PPGT); 2) Program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM-3T); dan 3) Program Pendidikan Profesi Guru Kolaboratif (PPG Kolaboratif). Program-program tersebut merupakan sebagian jawaban untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan di daerah 3T. Program SM-3T sebagai salah satu Program MBMI ditujukan kepada para Sarjana Pendidikan yang belum bertugas sebagai guru, baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Guru Tetap Yayasan (GTY), untuk ditugaskan selama satu tahun di daerah 3T. Program SM-3T dimaksudkan untuk membantu mengatasi kekurangan guru, sekaligus mempersiapkan calon guru profesional yang tangguh, mandiri, dan memiliki sikap peduli terhadap

sesama, serta memiliki jiwa pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa, agar dapat maju bersama mencapai cita-cita luhur seperti yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa Indonesia.

Program SM-3T adalah program pengabdian Sarjana Pendidikan untuk berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan pendidikan, percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T dan penyiapan pendidik profesional yang berlangsung selama satu tahun.

Program SM-3T dilakukan oleh pemerintah memiliki tujuan dalam rangka pemenuhan aspek standar nasional pendidikan, adapun tujuannya itu adalah disampaikan sebagai berikut:

1. Membantu daerah 3T dalam mengatasi permasalahan pendidikan terutama kekurangan tenaga pendidik;
2. Memberikan pengalaman pengabdian kepada Sarjana Pendidikan sehingga terbentuk sikap profesional dan terampil dalam memecahkan masalah pendidikan;
3. Menumbuhkan sikap cinta tanah air, bela negara, peduli, empati, terampil memecahkan masalah kependidikan, dan bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa;
4. Membangun daya juang dan ketahananmalangan dalam mengembangkan pendidikan di daerah-daerah yang

tergolong 3T;

5. Meningkatkan kecintaan terhadap profesi sebagai guru yang bertugas di daerah 3T; dan
6. Mempersiapkan calon pendidik profesional sebelum mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Program penyelenggaraan SM-3T yang dicetuskan oleh pemerintah dilakukan dengan cakupan tugas oleh guru yang bertugas antara lain:

1. Melaksanakan tugas pembelajaran pada satuan pendidikan sesuai dengan bidang keahlian dan tuntutan kondisi setempat;
2. Mendorong kegiatan inovasi pembelajaran di sekolah;
3. Melakukan kegiatan ekstrakurikuler;
4. Membantu tugas-tugas yang terkait dengan manajemen pendidikan di sekolah; dan
5. Melakukan tugas sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung program pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah 3T.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan model penyelenggaraan pendidikan untuk Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (D-3T) yang mengakomodasi keberagaman kondisi lingkungan, sosial, dan budaya setempat (berbasis kearifan lokal).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada sekolah di 3 kabupaten, yaitu: Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat; Kabupaten Manggari, Nusa Tenggara Timur; dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.

C. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan dengan model Borg dan Gall (2003). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan *Focus Group Discussion* dengan narasumber dari berbagai

kalangan mulai dari dinas pendidikan, kepala sekolah dan guru, Perguruan Tinggi, budayawan, tokoh masyarakat, dan orang tua yang berjumlah 29 orang dengan sebaran sebagai berikut.

Tabel 3.1 Distribusi Responden

	n	%
Dinas Pendidikan	9	31,05
Kepala Sekolah dan Guru	9	31,05
Masyarakat	11	37,9
Jumlah	29	100

D. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini, dijabarkan menjadi empat tahapan, yaitu: 1) Tahap pengumpulan data sekunder; 2) Tahapan verifikasi data; 3) Tahapan pengolahan data; 4) Tahapan kegiatan opsi review kebijakan.

Pada tahapan awal dilakukan prasurvei yang bersifat deskriptif, yaitu untuk menjangkau data tentang: 1) Kebutuhan sekolah; 2) Kondisi kemampuan; 3) Beban pekerjaan; dan 4) Sarana, fasilitas, dan lingkungan yang menjadi penunjang dan penghambat pelaksanaan program dalam rangka peningkatan kualitas profesional pembelajaran. Dalam tahap ini data dijangkau melalui wawancara. Hasil survai ini digunakan sebagai bahan

pertimbangan untuk mengembangkan model penyelenggaraan pendidikan berbasis kearifan lokal pada jenjang sekolah dasar, menengah, dan atas. Untuk Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (D-3T), yang sesuai dengan kondisi yang ada, dan penetapan lokasi uji coba pengembangan model pendekatan tersebut.

Pada tahapan kedua merupakan tahap pengumpulan data dengan beberapa elemen terkait yaitu dinas pendidikan, kepala sekolah dan guru, perguruan tinggi, masyarakat (budayawan, orang tua, tokoh adat).

Tahap ketiga merupakan tahap pengolahan dan pembahasan data, ini dilakukan untuk menganalisis model penyelenggaraan pendidikan untuk Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (D-3T) yang mengakomodasi keberagaman kondisi lingkungan, sosial, dan budaya setempat (berbasis kearifan lokal).

Tahapan keempat yaitu review opsi kebijakan merupakan tahap diseminasi hasil penelitian sebagai masukan kebijakan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif yang akan menggambarkan keadaan dari penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Pelaksanaan Sistem Pendidikan di Daerah 3T

1. Kabupaten Lombok Timur

Kabupaten Lombok Timur adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di sebelah timur Pulau Lombok. Ibu kota daerah ini ialah Kota Selong. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.605,55 km² dengan populasi 1.105.582 jiwa.

Secara geografis, Kabupaten Lombok Timur terletak antara 116°–117° Bujur Timur dan antara 8°–9° Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah 2.679,88 km² yang terdiri dari daratan seluas 1.605,55 km² (59,91%) dan lautan seluas 1.074,33 km² (40,09%).

Pulau Lombok terdiri dari 4 Daerah Aliran Sungai utama, salah satunya adalah Daerah Aliran Sungai Menanga, secara administratif masuk dalam wilayah Lombok Timur. Sesuai dengan SK Gubernur Nusa

Tenggara Barat Nomor 122 Tahun 2005 tentang status DAS/SWS maka DAS Menanga masuk dalam kategori DAS yang sangat kritis. Hal ini memberikan konsekuensi pada penanganan serius, khususnya krisis sumber daya air di wilayah ini.

Kabupaten Lombok Timur berbatasan dengan: utara dibatasi oleh Laut Jawa, selatan dibatasi oleh Samudra Hindia, di wilayah barat dibatasi oleh Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat, dan wilayah timur dibatasi oleh Selat Alas.

Wilayah Kabupaten Lombok Timur secara administratif terbagi dalam 20 wilayah kecamatan, 13 kelurahan, dan 96 desa. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah:

Aikme	Jerowaru	Keruak
Labuhan Haji	Masbagik	Montong Gading
Pringgabaya	Pringgasela	Sakra Barat
Sakra Timur	Sakra	Sambelia
Selong	Sembalun	Sikur
Suela	Sukamulia	Suralaga
Terara	Wanasaba	

Potensi daerah Kabupaten Lombok Timur memiliki beragam potensi yang perlu dikembangkan secara optimal, misalnya bidang pertanian. Daerah utara merupakan daerah pertanian yang subur dan merupakan lereng Gunung Rinjani dengan ketinggian 3.726 m. Daerah ini sangat berpotensi untuk pengembangan agroindustri. Seperti Sembalun misalnya, sekarang sudah ada PT. Sampoerna Agro yang melakukan investasi di daerah ini. Sementara itu, daerah selatan merupakan daerah lahan kering dengan curah hujan relatif rendah, namun daerah tersebut sangat potensial untuk pengembangan komoditas pertanian seperti tembakau jenis Virginia. Tanaman sayuran yang banyak ditanam masyarakat Lombok salah satunya kangkung, yang merupakan tanaman air yang merambat. Kangkung sangat populer dikarenakan banyak dikonsumsi sebagai makanan khas yakni Pelecing Kangkung, yang merupakan makanan khas Lombok.

Di daerah ini beragam potensi laut yang dimiliki. Beberapa daerahnya digunakan untuk pembudidayaan kerang mutiara. Selain mutiara, daerah ini juga merupakan daerah penghasil ikan yang cukup banyak,

beberapa pelabuhan alam terbentuk sebagai sentra produksi ikan laut, seperti Labuhan Lombok, Tanjung Luar, Labuhan Haji, dan lain-lain. Sayangnya potensi tersebut tidak diikuti oleh peningkatan nilai ekonomis produknya melalui pengolahan pasca panennya. Di samping itu terdapat juga budi daya rumput laut yang dikelola oleh masyarakat yang berada di daerah pesisir.

Alat transportasi unik yang dapat dijumpai di Lombok Timur adalah Cidomo dan Cikar, kendaraan bertenaga kuda ini mirip dengan Delman yang biasa kita jumpai di Pulau Jawa. Penggunaan kendaraan ini masih cukup luas pada daerah-daerah tertentu terutama yang dekat dengan daerah pasar tradisional.

Di Lombok Timur, tepatnya di Kota Pancor terdapat organisasi Nahdlatul Wathan, sebuah organisasi Islam lokal dengan pengaruh terbesar di Lombok. Kabupaten Lombok Timur adalah salah satu penyedia jasa tenaga kerja ke luar negeri, menurut data tahun 2003 dari BPS, terdapat 8.885 TKI yang berasal dari Lombok Timur. Sebagian besar bekerja di Malaysia, Arab Saudi, dan Brunei Darussalam.

Di Kayangan dapat ditemukan pelabuhan penyeberangan (ferry) yang beroperasi 24 jam dan dikelola oleh PT. Indonesia Ferry (Persero) menuju pelabuhan penyeberangan Poto Tano (Kabupaten Sumbawa Barat, Pulau Sumbawa).

a. Penerapan Kurikulum di Kabupaten Lombok Timur

Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kemendikbud, penerapan kurikulum di sekolah disesuaikan dengan kemampuan sekolah untuk melaksanakannya. Untuk Kabupaten Lombok Timur, kurikulum yang digunakan pada umumnya adalah kurikulum KTSP dan yang menggunakan kurikulum tahun 2013 masih sedikit. Hal ini disebabkan sekolah yang dapat melaksanakan Kurikulum 2013 adalah sekolah yang ditunjuk oleh dinas pendidikan setempat berdasarkan penilaian kemampuan sekolah untuk melaksanakannya.

Penerapan kurikulum KTSP pada pelaksanaannya tidaklah memberatkan guru karena tidak ada kesulitan, begitu pula sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 juga dapat melaksanakan dengan

baik. Pelaksanaan kurikulum di bawah pengawasan kepala sekolah dan dinas pendidikan setempat. Kurikulum yang dilaksanakan tidak lepas dari evaluasi yang bertujuan untuk melihat keefektifan pelaksanaan serta umpan balik kepada sekolah untuk pelaksanaan kurikulum menjadi lebih baik.

Kemudahan atau tidak adanya kendala pelaksanaan kurikulum, tidak lepas dari peran serta dinas pendidikan dalam memberikan berbagai pelatihan yang terkait sehingga guru memiliki acuan pelaksanaan kurikulum tersebut. Hal ini menyebabkan pemahaman guru terhadap kurikulum yang diterapkan di sekolah dapat dipahami dengan baik sehingga tidak ditemuinya kendala-kendala berarti dalam pelaksanaan kurikulum. Kelancaran pelaksanaan kurikulum dengan baik juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk standar minimal.

Masyarakat Lombok Timur adalah masyarakat yang sangat agamis, dimana mereka sangat mengedepankan nilai-nilai agama dan adat istiadat. Kurikulum yang digunakan di sekolah di

Lombok Timur yaitu KTSP dan Kurikulum 2013 dirasakan berbeda-beda oleh masyarakat. Masyarakat terdiri dari tokoh adat, budayawan, orang tua murid dan Perguruan Tinggi. Tanggapan masyarakat terhadap kecocokan kurikulum dengan keadaan masyarakat, ada yang menyatakan biasa saja, artinya kurikulum yang ada tidaklah istimewa dan belum mengangkat kearifan lokal seperti yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Selain itu ada pula masyarakat yang menganggap bahwa kurikulum yang ada saat ini sulit untuk dirasa cocok dengan keadaan masyarakat setempat. Artinya kurikulum yang ada tidaklah istimewa dan belum mengangkat kearifan lokal seperti yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Pada umumnya masyarakat kurikulum yang ada saat ini tidak perlu diganti dan sebagian kecil menyarankan untuk diganti. Kearifan lokal yang diharapkan dapat mengakomodir keinginan masyarakat dapat disisipkan dalam mata pelajaran yang ada (*hidden*).

Masyarakat saat ini merasa bahwa pemerintah memberikan dukungan penuh untuk terlaksananya kurikulum melalui berbagai program yang diberikan yaitu pelatihan kepada guru agar penerapannya sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Hal ini perlu dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga informasi terbaru tidak terputus. Selain itu, masyarakat mengharapkan adanya tambahan kurikulum muatan lokal yang disesuaikan dengan letak geografis maupun budaya setempat. Muatan lokal yang ada sekarang ini belum semua sesuai dengan keinginan masyarakat di mana masyarakat ingin kearifan lokal ini kembali mengangkat budaya, adat istiadat yang sesuai dengan norma, ada muatan agama Islam. Muatan lokal harus diintegrasikan dengan agama Islam karena masyarakat menganggap bahwa pergaulan siswa zaman sekarang sudah mulai terpenetrasi oleh budaya di luar budaya lokal setempat yang tidak sesuai.

Untuk sisi ekonomi masyarakat, kurikulum yang ada disesuaikan dengan perekonomian sebagian

besar masyarakatnya yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Untuk menunjang sektor pertanian, siswa dapat diajarkan bagaimana cara menanam sayuran untuk kebutuhan sehari-hari, atau pengolahan hasil pertanian dan perikanan untuk skala rumah tangga. Selain itu, karena Provinsi Nusa Tenggara saat ini mendapat penghargaan sebagai daerah dengan potensi pariwisata halalnya, maka sektor pariwisata juga dapat dikembangkan. Mulok tersebut disesuaikan untuk anak jenjang sekolah dasar. Siswa dapat diajarkan bagaimana membuat produk souvenir yang mudah yang memiliki nilai jual. Muatan lokal ini sangat perlu untuk dikembangkan oleh sekolah sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dengan menitipkan anak di sekolah.

Untuk mencapai keselarasan antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat melalui mata pelajaran Mulok ini, maka perlu sumber daya manusia yang memadai yaitu guru yang memang kompeten di bidangnya. Guru yang memahami

betul kearifan lokal setempat sehingga mampu menggali dan menyampaikan kepada siswa.

b. Data Deskriptif Sarana dan Prasarana Sekolah

Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, proses pembelajaran harus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Untuk lingkungan daerah 3T hal ini menjadi kendala utama untuk mendapatkan akses menjadi sekolah yang berkualitas. Di sini akan dibahas beberapa sarana dan prasarana sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan data menunjukkan bahwa pada umumnya sekolah memiliki kantor guru dan kantor kepala sekolah (66,6%) sebagai sarana guru untuk bekerja dan berdiskusi setelah mengajar. Selebihnya 33,3% sekolah belum memiliki ruang guru. Dengan dimilikinya ruang guru maka segala permasalahan terkait pembelajaran dapat diselesaikan bersama antarguru. Adapun ketersediaan kursi, meja khusus pimpinan, dan kursi tamu di ruang kepala sekolah hanya 66,6% yang tersedia. Berbeda

dengan perangkat lemari dan papan statistik, semua sekolah telah memiliki (100%).

Ruang tata usaha di setiap sekolah pada umumnya tidak dimiliki oleh sekolah (83.3%), hanya 16,6% sekolah yang memiliki ruang tata usaha. Pada umumnya ruang tata usaha bergabung dengan ruang guru. Hal ini menyebabkan kurang baiknya sistem pendokumentasian perangkat administrasi sekolah. Begitu pula untuk ruang bimbingan konseling di sekolah pada umumnya tidak dimiliki.

Untuk ketersediaan fasilitas pendukung sekolah, pada umumnya (83,3%) sekolah tidak memiliki fasilitas laboratorium khususnya laboratorium IPA, IPS, Seni dan Olah Raga, serta Unit Kesehatan Sekolah (UKS), tetapi untuk fasilitas olah raga atau lapangan, sebagian sekolah telah memilikinya. Sedangkan fasilitas untuk beribadah hanya 50% sekolah yang memiliki. Ketersediaan fasilitas tersebut yang masih sangat minim berpotensi proses pembelajaran tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Fasilitas perpustakaan dan ketersediaan sumber buku serta referensi lainnya yang harus dimiliki oleh setiap sekolah sudah terpenuhi oleh sekolah-sekolah di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 66,6%. Begitu pula sirkulasi peminjaman buku oleh siswa telah didokumentasikan dengan baik. Ternyata masih ada beberapa sekolah yang belum memiliki fasilitas perpustakaan. Dari sekolah-sekolah yang sudah memiliki ruang perpustakaan hanya 75% yang dilengkapi dengan sarana meja, kursi, dan peralatan lainnya, tetapi buku daftar kunjungan belum semua memiliki.

Untuk kondisi lahan sekolah yang dimiliki, pada umumnya masih layak digunakan untuk proses pembelajaran (100%) tetapi hanya 66,6% sekolah yang memiliki bangunan permanen/semi permanen. Bangunan sekolah yang memenuhi persyaratan keselamatan sekolah seperti kelayakan bangunan serta keamanannya telah dipenuhi oleh 83,3% sekolah sedangkan untuk aspek kesehatan sekolah seperti adanya ventilasi udara, sanitasi, dan pencahayaan telah dipenuhi oleh 66,6% sekolah. Secara keseluruhan, untuk rasio luas

lahan dengan jumlah siswa di sekolah tersebut pada umumnya (83,3%) telah memenuhi standar pendidikan.

Ketersediaan alat peraga pada umumnya sudah dimiliki oleh setiap sekolah mulai alat peraga untuk pelajaran IPA seperti kerangka manusia, model tubuh manusia, model tata surya, lensa, magnet, dan lain-lain sedangkan untuk pelajaran IPS seperti globe, peta atau atlas. Untuk pelajaran kesenian, Bahasa Indonesia seperti boneka pupet/karakter, sedangkan untuk pelajaran olah raga seperti bola volley, basket dan sepak bola pada umumnya telah tersedia (83,3%).

Pada umumnya setiap sekolah telah memiliki tempat olah raga, ruang kesenian, dan lapangan upacara (100%), tetapi untuk ruang keterampilan tidak dimiliki oleh semua sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Begitu pula untuk fasilitas jamban sekolah telah dimiliki oleh semua sekolah dengan memenuhi kriteria luas minimum dan masih ada sekolah yang jambannya tidak memenuhi kriteria standar kualifikasi.

Untuk kantin sekolah belum dimiliki oleh setiap sekolah, hanya 30% sekolah yang telah memiliki kantin dan jajanan yang tersedia bukanlah makanan yang sehat (100%). Ketersediaan alat di ruang UKS juga masih sangat kurang, timbangan, obat-obatan dan tempat cuci tangan sebagian tidak dimiliki oleh sekolah. Untuk alat tensi dan tempat tidur hanya dimiliki oleh 16% sekolah.

Upaya untuk menjaga kesehatan siswa di sekolah masing-masing dilakukan dengan adanya kemitraan antara sekolah dan Puskesmas. Sedangkan untuk keamanan sekolah dilakukan kemitraan dengan pihak Polsek dan Danramil setempat hanya dilakukan oleh 16% sekolah saja. Begitu pula untuk kemitraan dengan pemerintah desa dan kecamatan, pihak sekolah melakukan kemitraan (100%).

Penilaian hasil belajar siswa telah dilakukan oleh semua sekolah yaitu penilaian hasil belajar siswa berupa nilai harian, nilai semester, dan lain-lain. Penentuan KKM juga diterapkan begitu pun penentuan kelulusan. Hal ini dilakukan setelah melakukan beberapa proses baik penentuan tujuan

penilaian, menyusun kisi-kisi, analisis butir soal, penilaian, pengolahan dan penentuan kelulusan, pelaporan penilaian sampai kepada pemanfaatan hasil penilaian. Proses tersebut dilakukan oleh seluruh sekolah.

Alokasi anggaran yang diberikan pemerintah untuk investasi pada umumnya telah dilakukan oleh sekolah, hanya beberapa sekolah yang tidak menganggarkan untuk pengembangan pendidik.

c. Data yang Diperoleh dari Hasil FGD

Kurikulum yang berjalan saat ini walaupun dalam pelaksanaan tidak menghadapi kendala berarti serta guru dengan mudah melaksanakannya, tetapi kearifan lokal yang diharapkan oleh masyarakat belumlah sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dianggap kesalahan pemerintah yang membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetapi tidak konsisten mengembangkan budaya tiap-tiap daerah. Seperti telah diketahui bahwa masing-masing daerah memiliki keunikan serta kearifan lokal sendiri yang harus tetap dipertahankan. Selama ini muatan budaya kearifan lokal yang mencakup sosial budaya, kesenian, nilai-nilai adat

istiadat sudah mulai menurun kualitasnya serta generasi muda sudah tidak memahami budaya yang selama ini dianut oleh orang tuanya.

Kurikulum 2013 yang sebenarnya sudah hampir dapat mengakomodir dalam pengembangan kearifan lokal terkendala kurangnya SDM yang memadai untuk menanamkan nilai adat istiadat di Lombok Timur. Saat ini guru yang akan mengajar di sekolah tidak dibekali oleh pengetahuan dan wawasan budaya tempat calon guru akan mengajar sehingga untuk implementasi kearifan lokal sangat terbatas. Kearifan lokal saat ini hanya diimplementasikan melalui mata kuliah seni budaya dan prakarya. Itu pun sebatas pada pembuatan produk seni khas daerah tersebut. Padahal keutamaan kearifan lokal adalah tertanamnya nilai-nilai budaya dan adat istiadat setempat sehingga akan melekat terus pada generasi muda. Sedangkan orang yang memahami mengenai nilai-nilai budaya pada umumnya adalah tokoh-tokoh adat yang bukan guru di sekolah. Ditemui juga beberapa sekolah yang memberikan muatan lokal dengan Bahasa Inggris

atau Komputer untuk siswanya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kearifan lokal Lombok Timur. Bahasa Inggris adalah bahasa asing bukan bahasa lokal setempat. Sebaiknya Mulok mengangkat bahasa dan budaya lokal.

2. Kabupaten Sungai Hulu Utara

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Amuntai. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 915,05 km² atau 2,38% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan dan berpenduduk sebanyak 211.699 jiwa (Data BPS Hulu Sungai Utara 2011).

Ditinjau secara geografis, Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada koordinat antara 2°-3° Lintang Selatan dan 115°-116° Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak di daerah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 m sampai dengan 7 m di atas permukaan air laut dan dengan kemiringan berkisar antara 0 persen sampai dengan 2 persen.

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Jumlah curah hujan terbanyak pada tahun 2005 terjadi pada bulan Februari yang mencapai 359 mm dan pada bulan April yang mencapai 351 mm dengan jumlah hari hujan masing-masing 14 dan 19.

Data penggunaan tanah pada tahun 2005 di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu: kampung seluas 4.283 ha, sawah seluas 23.853 ha, kebun campuran 1.859 ha, hutan rawa 29.711 ha, rumput rawa 22.768 ha, danau seluas 1.800 ha, penggunaan lainnya seluas 1.224 ha.

Luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah $\pm 892,7 \text{ km}^2$ atau hanya $\pm 2,38$ persen dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan luas wilayah sebesar $892,7 \text{ km}^2$ ini, sebagian besar terdiri atas dataran rendah yang digenangi oleh lahan rawa baik yang tergenang secara monoton maupun yang tergenang secara periodik. Kurang lebih 570 km^2 adalah merupakan lahan rawa dan sebagian besar belum termanfaatkan secara optimal.

Batas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

Utara : Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong

Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Barat : Provinsi Kalimantan Tengah

Timur : Kabupaten Balangan

Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan setelah terbentuknya Kabupaten Balangan dengan jumlah desa/kelurahan yang tersebar sebanyak 219 desa/kelurahan. Selain itu, desa/kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori, antara lain Desa Swadaya sebanyak 3 (di Kecamatan Banjang), Desa Swakarya ada 1 (di Kecamatan Banjang), dan Desa Swasembada sebanyak 215 desa. Adapun daftar 10 kecamatan tersebut adalah: Amuntai Selatan, Amuntai Tengah, Amuntai Utara, Babirik, Banjang, Danau Panggang, Haur Gading, Paminggir, Sungai Pandan, Sungai Tabukan.

Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan hasil sensus penduduk Indonesia 2010 adalah 209.037 jiwa tersebar di 219 kelurahan/desa.

Kabupaten dengan luas wilayah 892,7 km² ini memiliki kepadatan penduduk (*population density*) 220 jiwa per km² dan rata-rata setiap keluarga terdiri dari 4 orang. Laju pertumbuhan penduduk Hulu Sungai Utara antara tahun 2000–2010 sebesar 0,61% dan merupakan urutan terendah untuk kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

a. Penerapan Kurikulum di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Penerapan kurikulum di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kemendikbud, penerapan kurikulum di sekolah disesuaikan dengan kemampuan sekolah untuk melaksanakannya. Untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara, kurikulum yang digunakan pada umumnya adalah kurikulum KTSP dan yang menggunakan kurikulum tahun 2013 masih sedikit. Hal ini disebabkan sekolah yang dapat melaksanakan Kurikulum 2013 adalah sekolah yang ditunjuk oleh dinas pendidikan setempat berdasarkan penilaian kemampuan sekolah untuk melaksanakannya.

Penerapan kurikulum KTSP pada pelaksanaannya tidaklah memberatkan guru karena tidak ada kesulitan begitu pula sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 juga dapat melaksanakan dengan baik. Pelaksanaan kurikulum di bawah pengawasan kepala sekolah dan dinas pendidikan setempat. Kurikulum yang dilaksanakan tidak lepas dari evaluasi yang bertujuan untuk melihat keefektifan pelaksanaan serta umpan balik kepada sekolah untuk pelaksanaan kurikulum menjadi lebih baik.

Kemudahan atau tidak adanya kendala pelaksanaan kurikulum, tidak lepas dari peran serta dinas pendidikan dalam memberikan berbagai pelatihan yang terkait sehingga guru memiliki acuan pelaksanaan kurikulum tersebut. Hal ini menyebabkan pemahaman guru terhadap kurikulum yang diterapkan di sekolah dapat dipahami dengan baik sehingga tidak ditemuinya kendala-kendala berarti dalam pelaksanaan kurikulum. Kelancaran pelaksanaan kurikulum dengan baik juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk standar minimal.

Masyarakat Hulu Sungai Utara adalah masyarakat yang sangat agamis, dimana mereka sangat mengedepankan nilai-nilai agama dan adat istiadat. Kurikulum yang digunakan di sekolah di Lombok Timur yaitu KTSP dan Kurikulum 2013 dirasakan berbeda-beda oleh masyarakat. Masyarakat terdiri dari tokoh adat, budayawan, orang tua murid dan Perguruan Tinggi. Tanggapan masyarakat terhadap kecocokan kurikulum dengan keadaan masyarakat ada yang menyatakan biasa saja, artinya kurikulum yang ada tidaklah istimewa dan belum mengangkat kearifan lokal seperti yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Selain itu ada pula masyarakat yang menganggap bahwa kurikulum yang ada saat ini sulit untuk dirasa cocok dengan keadaan masyarakat setempat. Artinya kurikulum yang ada tidaklah istimewa dan belum mengangkat kearifan lokal seperti yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Pada umumnya masyarakat kurikulum yang ada saat ini tidak perlu diganti dan sebagian kecil menyarankan untuk diganti. Kearifan lokal yang diharapkan dapat mengakomodir keinginan masyarakat dapat

disisipkan dalam mata pelajaran yang ada (*hidden*).

Masyarakat saat ini merasa bahwa pemerintah memberikan dukungan penuh untuk terlaksananya kurikulum melalui berbagai program yang diberikan yaitu pelatihan kepada guru agar penerapannya sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Hal ini perlu dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga informasi terbaru tidak terputus. Selain itu, masyarakat mengharapkan adanya tambahan kurikulum muatan lokal yang disesuaikan dengan letak geografis maupun budaya setempat. Muatan lokal yang ada sekarang ini belum semua sesuai dengan keinginan masyarakat di mana masyarakat ingin kearifan lokal ini kembali mengangkat budaya, adat istiadat yang sesuai dengan norma, ada muatan agama Islam. Muatan lokal harus diintegrasikan dengan agama Islam karena masyarakat menganggap bahwa pergaulan siswa zaman sekarang sudah mulai terpenetrasi oleh budaya di luar budaya lokal setempat yang tidak sesuai.

Untuk sisi ekonomi masyarakat, kurikulum yang ada disesuaikan dengan perekonomian sebagian besar masyarakatnya yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Untuk menunjang sektor pertanian, siswa dapat diajarkan bagaimana cara menanam sayuran untuk kebutuhan sehari-hari, atau pengolahan hasil pertanian dan perikanan untuk skala rumah tangga. Selain itu karena Provinsi Kalimantan Selatan saat ini mendapat penghargaan sebagai daerah dengan potensi pariwisata halalnya, maka sektor pariwisata juga dapat dikembangkan. Mulok tersebut disesuaikan untuk anak jenjang sekolah dasar. Siswa dapat diajarkan bagaimana membuat produk souvenir yang mudah yang memiliki nilai jual. Muatan lokal ini sangat perlu untuk dikembangkan oleh sekolah sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dengan menitipkan anak di sekolah.

Untuk mencapai keselarasan antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat melalui mata pelajaran Mulok ini, maka perlu sumber daya manusia yang memadai yaitu guru yang memang

kompeten di bidangnya. Guru yang memahami betul kearifan lokal setempat sehingga mampu menggali dan menyampaikan kepada siswa.

b. Data Deskriptif Sarana dan Prasarana Sekolah

Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, proses pembelajaran harus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Untuk lingkungan daerah 3T hal ini menjadi kendala utama untuk mendapatkan akses menjadi sekolah yang berkualitas. Di sini akan dibahas beberapa sarana dan prasarana sekolah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan data menunjukkan bahwa pada umumnya sekolah memiliki kantor guru dan kantor kepala sekolah (66,6%) sebagai sarana guru untuk bekerja dan berdiskusi setelah mengajar. Selebihnya 33,3% sekolah belum memiliki ruang guru. Dengan dimilikinya ruang guru maka segala permasalahan terkait pembelajaran dapat diselesaikan bersama antarguru. Adapun ketersediaan kursi, meja khusus pimpinan, dan kursi tamu di ruang kepala sekolah hanya 66,6% yang tersedia. Berbeda

dengan perangkat lemari dan papan statistik, semua sekolah telah memiliki (100%).

Ruang tata usaha di setiap sekolah pada umumnya tidak dimiliki oleh sekolah (83.3%), hanya 16,6% sekolah yang memiliki ruang tata usaha. Pada umumnya ruang tata usaha bergabung dengan ruang guru. Hal ini menyebabkan kurang baiknya sistem pendokumentasian perangkat administrasi sekolah. Begitu pula untuk ruang bimbingan konseling di sekolah pada umumnya tidak dimiliki.

Untuk ketersediaan fasilitas pendukung sekolah, pada umumnya (83,3%) sekolah tidak memiliki fasilitas laboratorium khususnya laboratorium IPA, IPS, Seni dan Olah Raga, serta Unit Kesehatan Sekolah (UKS), tetapi untuk fasilitas olah raga atau lapangan, sebagian sekolah telah memilikinya. Sedangkan fasilitas untuk beribadah hanya 50% sekolah yang memiliki. Ketersediaan fasilitas tersebut yang masih sangat minim berpotensi proses pembelajaran tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Fasilitas perpustakaan dan ketersediaan sumber buku serta referensi lainnya yang harus dimiliki oleh setiap sekolah sudah terpenuhi oleh sekolah-sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 66,6%. Begitu pula sirkulasi peminjaman buku oleh siswa telah didokumentasikan dengan baik. Ternyata masih ada beberapa sekolah yang belum memiliki fasilitas perpustakaan. Dari sekolah-sekolah yang sudah memiliki ruang perpustakaan, hanya 75% yang dilengkapi dengan sarana meja, kursi, dan peralatan lainnya, tetapi buku daftar kunjungan belum semua memiliki.

Untuk kondisi lahan sekolah yang dimiliki, pada umumnya masih layak digunakan untuk proses pembelajaran (100%) tetapi hanya 66,6% sekolah yang memiliki bangunan permanen/semi permanen. Bangunan sekolah yang memenuhi persyaratan keselamatan sekolah seperti kelayakan bangunan serta keamanannya telah dipenuhi oleh 83,3% sekolah sedangkan untuk aspek kesehatan sekolah seperti adanya ventilasi udara, sanitasi, dan pencahayaan telah dipenuhi oleh 66,6%

sekolah. Secara keseluruhan, untuk rasio luas lahan dengan jumlah siswa di sekolah tersebut pada umumnya (83,3%) telah memenuhi standar pendidikan.

Ketersediaan alat peraga pada umumnya sudah dimiliki oleh setiap sekolah mulai alat peraga untuk pelajaran IPA seperti kerangka manusia, model tubuh manusia, model tata surya, lensa, magnet, dan lain-lain sedangkan untuk pelajaran IPS seperti globe, peta atau atlas. Untuk pelajaran kesenian, Bahasa Indonesia seperti boneka pupet/karakter, sedangkan untuk pelajaran olah raga seperti bola volley, basket, dan sepak bola pada umumnya telah tersedia (83,3%).

Pada umumnya setiap sekolah telah memiliki tempat olah raga, ruang kesenian, dan lapangan upacara (100%), tetapi untuk ruang keterampilan tidak dimiliki oleh semua sekolah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Begitu pula untuk fasilitas jamban sekolah telah dimiliki oleh semua sekolah dengan memenuhi kriteria luas minimum dan masih ada sekolah yang jambannya tidak memenuhi kriteria standar kualifikasi.

Untuk kantin sekolah belum dimiliki oleh setiap sekolah, hanya 30% sekolah yang telah memiliki kantin dan jajanan yang tersedia bukanlah makanan yang sehat (100%). Ketersediaan alat di ruang UKS juga masih sangat kurang, timbangan, obat-obatan, dan tempat cuci tangan sebagian tidak dimiliki oleh sekolah. Untuk alat tensi dan tempat tidur hanya dimiliki oleh 16% sekolah.

Upaya untuk menjaga kesehatan siswa di sekolah masing-masing dilakukan dengan adanya kemitraan antara sekolah dan Puskesmas. Sedangkan untuk keamanan sekolah dilakukan kemitraan dengan pihak Polsek dan Danramil setempat hanya dilakukan oleh 16% sekolah saja. Begitu pula untuk kemitraan dengan pemerintah desa dan kecamatan, pihak sekolah melakukan kemitraan (100%).

Penilaian hasil belajar siswa telah dilakukan oleh semua sekolah yaitu penilaian hasil belajar siswa berupa nilai harian, nilai semester, dan lain-lain. Penentuan KKM juga diterapkan, begitu pun penentuan kelulusan. Hal ini dilakukan setelah melakukan beberapa proses baik penentuan tujuan

penilaian, menyusun kisi-kisi, analisis butir soal, penilaian, pengolahan dan penentuan kelulusan, pelaporan penilaian sampai kepada pemanfaatan hasil penilaian. Proses tersebut dilakukan oleh seluruh sekolah.

Alokasi anggaran yang diberikan pemerintah untuk investasi pada umumnya telah dilakukan oleh sekolah, hanya beberapa sekolah yang tidak menganggarkan untuk pengembangan pendidik.

c. Data yang Diperoleh dari Hasil FGD

Keadaan geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara Banjarmasin Kalimantan Selatan. Luas daratan $\pm 800 \text{ km}^2$ dengan 90% rawa-rawa, tidak ada perbukitan, 40% tergenang sepanjang waktu. Jumlah desa adalah 219. Penduduk 99% beragama Islam. Mata pencaharian 30% pencari ikan (nelayan) dan peternak bebek. Sebagian kecil mata pencahariannya di industri kecil atau insdustri rumah tangga (UMKM) kerajinan mebel stainles. Jarak antardaerah cukup dekat tapi sulit akses jalan hanya disambungkan dengan titian-titian.

Sekolah umum (Kemendikbud) jumlahnya berimbang dengan sekolah berbasis agama (Kemenag) dengan jumlah sekolah berbasis agama adalah 81 SD, SD umum 186, 30 SMP, dan 30 Tsanawiyah. Kurikulum perpaduan Kurnas dengan agama. Model pembelajaran setelah sekolah siswa diharuskan mengikuti kegiatan kearifan lokal keagamaan.

Dengan kondisi geografis dan kearifan lokal maka kebijakan dalam pengelolaan kelas menurut Sekretaris Dinas yaitu perlu didirikan SMK dengan jurusan yang disesuaikan dengan kearifan lokal, misalnya SMK perikanan, perkapalan dengan bahan dasar fiber karena bahan dasar kayu sudah jarang. Dana BOS, juknisnya disesuaikan dengan karakteristik daerah. Sarana prasarana memerlukan biaya besar karena kontur tanah yang rawa-rawa sehingga bangunan cepat rusak.

Kendala pendidikan di daerah 3T, yaitu: 1) Fasilitas masih minim; 2) Kualitas/kompetensi guru masih rendah; dan 3) Komitmen guru yang masih kurang.

Pelatihan yang diadakan oleh pusat yang tidak tuntas sehingga guru kurang memahami hasil pelatihan dan tidak mampu menerapkan di sekolah, akhirnya kembali ke cara atau model tradisional.

Kompetensi lulusan di kurikulum terlalu tinggi sehingga susah tercapai untuk daerah. Muatan kurikulum terlalu banyak. Pendamping guru yang TOT kurang menguasai sehingga malah membingungkan guru-guru. Guru kebingungan masalah penilaian di kurikulum baru (Kurikulum 2013). Balitbang membuat standar penilaian yang sederhana tapi sesuai harapan. Pengadaan buku yang terlambat menyulitkan guru dalam mencari bahan dan sumber belajar. Revisi buku yang tidak final sehingga membingungkan guru-guru. Sebagian sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum memahami kurikulum yang ada. Perlu tenaga ahli IT setiap sekolah 1 orang. Mengadakan pelatihan yang *best practise* untuk guru-guru.

Kepala sekolah menyampaikan tentang rendahnya guru-guru dalam penguasaan alat pembelajaran.

Pembelajaran berbasis lingkungan dengan kearifan lokal yang religius sehingga pembelajaran ada keterpaduan dengan keagamaan. Perlu adanya pelatihan kepada guru-guru mengenai model-model pembelajaran yang mudah diaplikasikan sehingga pembelajaran efektif dan efisien.

Wilayah perairan sehingga guru perlu diberikan pelatihan tentang perikanan, perkapalan sederhana supaya guru bisa mengajarkan kepada siswa sesuai karakteristik daerah. Mengharapkan pemerintah menyekolahkan siswa anak daerah untuk belajar teknik perikanan dan perkapalan sehingga putra daerah bisa membangun daerahnya.

Guru berpendapat bahwa standar kompetensi lulusan harus fleksibel, jangan dsamakan dengan sekolah perkotaan. SDM masih sangat kurang kualitasnya. Model pembelajaran berbasis lingkungan (keagamaan). Bahan dan sumber belajar yang sangat kurang.

3. Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur

Manggarai Barat adalah sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di wilayah paling barat NTT dan berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Manggarai Barat terkenal dengan kawasan wisata Pulau Komodo dan wisata alam Labuan Bajo. Oleh karena itu, saat ini Manggarai Barat sedang dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata utama di Indonesia.

Wilayah Kabupaten Manggarai Barat meliputi daratan Pulau Flores bagian barat dan beberapa pulau di sekitarnya yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Seraya Besar, Pulau Seraya Kecil, Pulau Bidadari, dan Pulau Longos. Beberapa suku yang ada di wilayah ini ialah Suku Bajo, Bugis, Bima, dan Manggarai.

Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari sepuluh kecamatan, yaitu Komodo, Boleng, Sano Nggoang, Lembor, Lembor Selatan, Welak, Kuwus, Mbeliling, Ndosso, dan Macang Pacar. Kecamatan paling besar jumlah penduduknya adalah Kecamatan Komodo, sekitar 20 persen penduduk Kabupaten Manggarai bertempat tinggal di kecamatan tersebut. Kecamatan

ini juga merupakan kecamatan paling luas di Kabupaten Manggarai Barat.

Letak geografis Manggarai Barat dan alamnya yang indah menjadi modal utama dijadikannya lokasi ini tujuan wisata dunia yang amat sangat diminati para turis. Taman Nasional Komodo merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO yang menjadikannya destinasi pariwisata yang mulai berkembang. Ini terlihat dari penuhnya penerbangan dari Jakarta atau lokasi lain ke Labuan bajo dan sebaliknya, baik dipenuhi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara.

Sebagai lokasi pariwisata yang mulai berkembang, memunculkan berbagai mata pencaharian baru bagi sebagian masyarakatnya, misalnya sebagai pedagang makanan maupun barang kerajinan asli daerah, supir, dan rental mobil. Pariwisata juga mengakibatkan harga tanah di Labuan Bajo melonjak pesat. Sebagian besar pembelinya adalah orang di luar wilayah Labuan Bajo. Di samping itu, mulai bermunculan hotel-hotel baru di wilayah pesisir yang mengambil lokasi dengan *view* ke lautan.

Tanah di wilayah Manggarai Barat utamanya di Pulau Flores bagian barat dapat ditanami padi, kopi, coklat,

cengkeh, kemiri, dan jambu mete. Metode tanam tumpang sari diterapkan di masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat memanfaatkan tanah yang mereka miliki dan kelola seefisien mungkin. Mereka memiliki motto “Apa yang bisa dilakukan dan dimakan, akan dikerjakan oleh masyarakat”. Dengan kondisi ini maka mata pencaharian sebagian besar masyarakatnya ialah bertani dan sebagian nelayan. Para nelayan ini merupakan keturunan Suku Bajo yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Mereka sudah bertahun-tahun menetap di Labuan Bajo. Menurut responden yang merupakan warga asli Manggarai Barat, Suku Bajo tidak dapat berada lama di daratan. Sebagian besar waktu hidup mereka berada di lautan (di atas perahu/kapalnya).

Tabel 4.1 Kualitas SDM Kabupaten Manggarai Barat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen IPM di Kabupaten Manggarai Barat, 2016	
Uraian	Capaian
Angka Harapan Hidup (tahun)	66,19
Harapan Lama Sekolah (tahun)	10,67
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6,82
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	7 149,00
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	60,63

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Manggarai Barat adalah 60,63, berada dalam kategori sedang. Nilai berada di bawah nilai rata-rata IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada pada nilai 63,13 dan masih jauh dari IPM nasional yang mencapai 70,18 (kategori tinggi). Pada komponen rata-rata lama sekolah Manggarai Barat baru mencapai 6,82 dibandingkan nasional yang sudah mencapai 7,95. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Manggarai Barat.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah berupaya untuk meningkatkan layanan pendidikan pada berbagai jenjangnya. Jumlah satuan pendidikan untuk SD sederajat adalah 283 unit, SMP sederajat 94 unit, SMA sederajat 29 sekolah, dan SMK sebanyak 10 sekolah. Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan untuk jenjang SD adalah 96,94 persen, SMP sebesar 71,72 persen, SMA sebesar 47,70 persen, dan PT sebesar 5,10 persen (BPS, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa baru layanan pendidikan pada tingkat SD yang sudah relatif merata dirasakan oleh penduduk Manggarai Barat. Sedangkan untuk jenjang

pendidikan selanjutnya terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah APM-nya. Hal ini menunjukkan bahwa layanan pendidikan tersebut belum bisa diakses oleh sebagian penduduk Manggarai Barat. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS terlihat kecenderungan bahwa APM pendidikan perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan APM pendidikan laki-laki.

Tabel 4.2 Tabel Angka Partisipasi Kasar dan Murni (APK, APM) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Manggarai Barat, 2015						
Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)			Angka Partisipasi Murni (APM)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
SD Sederajat	114.44	106.03	109.70	97.86	96.23	96.94
SMP Sederajat	73.79	110.71	89.80	67.69	76.98	71.72
SMA Sederajat	49.44	59.44	54.17	38.96	57.47	47.70
Perguruan Tinggi	3.41	6.37	5.10	3.41	6.37	5.10

Masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat sangat menghargai pendidikan. Mereka bangga dengan anak-

anaknya yang sekolah. Bahkan seorang saudara bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak dari saudaranya, mereka memberikan dukungan yang sangat berarti. Seperti yang dikemukakan oleh beberapa responden sebagai berikut.

Suster Felicitas berpendapat bahwa, “Masyarakat Manggarai Barat memiliki pandangan yang luar biasa terhadap pendidikan. Masyarakat memiliki kesadaran untuk mendukung pendidikan, bahkan ada yang membentuk dukungan bersama-sama untuk membiayai pendidikan seorang anak”. Pak Vincent berpendapat bahwa, “Orang tua sangat besar dukungannya terhadap pendidikan anaknya, sampai menjual segala-galanya (demi anaknya sekolah)”.

Dengan perkembangan wilayah ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo, menjadi destinasi pariwisata dunia, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap masyarakatnya, misalnya saja harga sayuran di wilayah ini meningkat. Peningkatan pada status sosial ekonomi masyarakat masih perlu diteliti lebih lanjut.

Menurut salah satu responden, perkembangan pariwisata memiliki pengaruh sangat besar ke

pendidikan, seperti banyak sekolah yang mengajarkan Bahasa Inggris sebagai muatan lokal. Dari sisi budaya, pariwisata juga membawa pengaruh negatif karena wisatawan asing membawa budaya yang berbeda dan sering kali tidak sesuai dengan nilai budaya lokal. Namun secara ekonomi bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, pariwisata memiliki peran yang sangat besar. Dari sisi kelestarian lingkungan, pembangunan hotel-hotel baru bisa/akan merusak lingkungan, apalagi jika tidak ada pembatasan dan peraturan daerah yang mendukung konservasi lingkungan.

Selama ini wisatawan hanya tertarik pada komodo dan pemandangan laut di Kabupaten Manggarai Barat, sementara seni dan budaya belum tergarap (dipromosikan) dengan maksimal. Sehingga potensi untuk mengembangkan seni budaya lokal masih sangat besar.

Beberapa nilai tradisi budaya yang ada, antara lain: Tari Caci menggambarkan keperkasaan para pria dalam peperangan; Tradisi Dampo yaitu terkait dengan upaya perdamaian; dan Lonto Leok yaitu duduk bersama untuk menyelesaikan masalah agar

pertikaian tidak menelan korban. Tradisi untuk menyelesaikan pertikaian antara anggota masyarakat dilakukan melalui pertemuan khusus oleh para sesepuh adat yang dilaksanakan di Rumah Gedang. Dalam bermasyarakat, ada saja permasalahan yang timbul, umumnya permasalahan antaranggota masyarakat dipicu oleh permasalahan tentang tanah. Jika ini terjadi, maka dipecahkan secara musyawarah dan mufakat dengan melibatkan ketua adat dan sesepuh adat di rumah adat.

Ada juga tradisi Lodo yaitu perundingan kerja sama misalnya dalam kegiatan bertani. Sayangnya belum banyak tulisan atau karya seni tentang budaya Manggarai Barat. Ada beberapa legenda, misalnya tentang Danau Sangoang, yang masih diingat masyarakat. Namun, sangat disayangkan bahwa legenda-legenda ini serta lagu-lagu daerah dan kebiasaan masyarakat yang sudah dilakukan sejak lama tidak ditulis dan dibukukan, sehingga jika arus budaya dari luar yang masuk ke wilayah ini tidak terbendung maka bisa saja budaya dan kearifan lokal di daerah ini akan pudar. Namun demikian, ada salah satu LSM yang sudah membuat buku terkait legenda

di wilayah ini sebagai salah satu cara agar kearifan lokal yang merupakan bagian dari budaya ini tetap terjaga.

Penanaman nilai-nilai kearifan lokal dapat dilakukan melalui pembelajaran Muatan Lokal (Mulok). Beberapa sekolah mengimplementasikan Pendidikan Lingkungan Sosial dan Budaya Daerah (PLSBD) sebagai pelajaran Mulok. Salah satu kepala SD Katolik Waemedu menyatakan bahwa mereka mengajarkan Mulok melalui dongeng-dongeng lokal di masyarakat, misalnya cerita tentang Danau Sano Nggoang yang merupakan potensi ekowisata menarik di mana danau ini danau vulkanik dan merupakan habitat beberapa jenis burung. Ada juga pengajaran konservasi lingkungan hidup, pengolahan pangan lokal, dan teknologi lokal seperti pembuatan lampu dan memasak dengan tungku. Untuk pembelajaran konservasi lingkungan, siswa diberikan pengetahuan tentang keragaman hayati dalam muatan lokal. Diharapkan siswa sebagai generasi masa depan peduli terhadap kelestarian alamnya dan dapat melibatkan orang tuanya untuk peduli lingkungan. Salah satu lokasi yang kaya akan keragaman hayati ialah wilayah

hutan Kecamatan Mbeliling. Ada buku muatan lokal yang diterbitkan LSM Burung Indonesia yang sudah diakui oleh Dinas Pendidikan Manggarai Barat yang digunakan untuk pembelajaran Muatan Lokal. Namun baru dua kecamatan yang menggunakannya.

SDK Santa Familia mengisi pelajaran Mulok dengan program Kathekise (program keagamaan) yang dilaksanakan 2 jam per minggu. Sekolah mendapatkan bantuan buku dari LSM Green Books sebanyak 100 buku untuk program ini. Sekolah ini juga mendapatkan buku tentang konservasi burung dari LSM Burung Indonesia. Pihak sekolah mengajarkan kepada para siswa untuk peduli lingkungan, dengan motto 'LISA' (Lihat Ini Sampah, Angkat).

SD Negeri Lancang mengisi pelajaran Mulok dengan mengajarkan anak menanam di halaman sekolah. Namun karena sekolah tidak memiliki pagar maka sering kali binatang ternak masuk dan merusak tanaman sekolah.

Beberapa sekolah mengalami kesulitan dalam melaksanakan Muatan Lokal (Mulok), yaitu:

- a. Sulit untuk mencari buku untuk pembelajaran muatan lokal;

- b. Dalam menyusun muatan lokal, guru sulit untuk memasukkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD);
- c. Hambatan di ketenagaan, di sekolah swasta tidak boleh ada guru PNS;
- d. Sekolah kehilangan guru yang telah dibina dan disiapkan, karena ketika guru tersebut diangkat menjadi PNS maka guru tersebut akan dipindah ke sekolah lain, sehingga sekolah awal kehilangan guru dan kekurangan;
- e. Pembelajaran Mulok di sekolah kami terhambat karena para siswa berasal dari berbagai suku, yaitu Bugis, Bima, Mandar, dan Bajo.

Menurut pihak dinas pendidikan, Antonius Jeta, di Manggarai Barat masih banyak sekolah yang belum melaksanakan Kurikulum 2013 (K-13). Sebanyak 75 persen sekolah di Manggarai Barat masih menggunakan KTSP dan hanya 25 persen yang menggunakan K-13. Mengapa K-13 tidak dilaksanakan di banyak sekolah:

- 1) Temuan dari KIAT (Program KIAT Guru didukung penuh oleh Pemerintah Australia—*Department of Foreign Affairs and*

Trade (DFAT) menunjukkan 75% siswa kelas 1 SD belum bisa baca tulis yang mengharuskan guru untuk banyak berinteraksi dengan siswa sedangkan waktu guru sebagian besar untuk menyiapkan administrasi pelaksanaan K-13.

- 2) Terkait dengan implementasi K-13, khusus untuk siswa kelas 1 guru merasa dilema antara mengajarkan K-13 atau mengajarkan anak membaca dan menulis. Karena anak-anak kelas 1 sebagian besar belum bisa membaca dan menulis, sedangkan guru dituntut untuk menyelesaikan tema-tema di dalam K-13.
- 3) Selain itu guru menganggap buku siswa tidak serinci seperti KTSP.
- 4) Keterlambatan pengiriman buku K-13 juga menjadi kendala, dan buku tidak dijual bebas sehingga sulit mendapatkannya.
- 5) Format penilaian yang banyak sekali sehingga membebani guru.
- 6) Inti dari K-13 adalah pembentukan karakter. Sedangkan pembentukan karakter tidak hanya di sekolah, tetapi juga di keluarga. Sehingga

tidak seharusnya pemerintah membebankan pendidikan karakter di pendidikan formal.

- 7) Mata pelajaran di K-13 tidak fokus.
- 8) Implementasi K-13 membuat para guru harus membuat RPP setiap hari, misalkan setiap tema ada 4 subtema, setiap subtema ada 6 pembelajaran, jadinya guru harus membuat 24 RPP dalam satu tema saja.

Kepala sekolah dan guru di Kabupaten Manggarai Barat lebih suka menggunakan KTSP karena alasan-alasan di atas.

Kepala sekolah SDK Waemedu sudah menerapkan pendekatan *Scientific Learning* (SL) dalam pembelajarannya. Menurutnya, SL sangat menyenangkan dan membuat siswa menalar. Menurut Suster Felicia, ini merupakan salah satu kelebihan K-13 sehingga para kepala sekolah mengkombinasikan pendekatan ini dengan KTSP. Dalam SL, pembelajaran dilakukan dengan berdiskusi menemukan permasalahan, mengolah dan bertanggung jawab menemukan solusinya. Lingkungan di luar kelas digunakan sebagai sumber pembelajaran, misalnya tentang ciri

tumbuhan dan hewan, kemudian siswa diberi LKS untuk mengerjakan tugasnya. *Scientific Learning* sebaiknya didukung oleh media infokus, namun karena sekolah hanya punya satu infokus dan diletakkan di ruang rapat, maka di kelas tidak ada infokusnya. Sehingga guru mencari sarana lain untuk menggantikan media tersebut yaitu dengan menugaskan siswa memfotokopi warna atau mencari di internet tentang berbagai benda/hewan/tanaman dan mencetaknya. Selanjutnya siswa yang dibagi per kelompok saling bertukar gambar dan menuangkan analisisnya melalui LKS. Namun, tidak semua guru kreatif membuat sarana pengganti untuk LCD. Para responden berpendapat bahwa SL akan lebih bermakna jika menggunakan sarana LCD, sedangkan tidak semua sekolah memiliki sarana ini.

Dana pendidikan untuk SD negeri, sumber dana berasal dari BOS, siswa tidak dipungut iuran apapun, sementara untuk SD swasta partisipasi orang tua masih dibutuhkan, misalnya SDK Waemedu menarik iuran kepada orang tua siswa

berdasarkan kategori pekerjaan orang tua. Misalnya kategori 1 (petani dan buruh) Rp175.000,00 per tahun, kategori 2 pegawai swasta/kontrak Rp250.000,00 per tahun, kategori 3 PNS golongan II Rp300.000,00 per tahun, kategori 4 PNS golongan III Rp450.000,00 per tahun, kemudian pegawai PNS golongan IV atau pejabat dan pengusaha Rp500.000,00 per tahun.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Kurikulum di Daerah 3 T

Kurikulum sebagai faktor penting dalam sistem pendidikan nasional akan berhasil jika semua satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kepada peserta didik dan dengan hasil evaluasi yang baik. Dalam penerapan kurikulum di daerah 3T terlihat bahwa pelaksanaannya sudah dilakukan dinyatakan secara merata oleh 78 persen responden dari dinas pendidikan di tiga kabupaten, sedangkan 22 persen belum melaksanakannya belum merata. Selain itu 89 persen menyatakan penerapan kurikulum sudah dinyatakan baik dan 11 persen lainnya dinyatakan belum baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah

daerah maupun pusat perlu melakukan berbagai upaya untuk pelaksanaan kurikulum di berbagai daerah agar dapat berjalan dengan baik seperti menyediakan akses bagi satuan pendidikan serta sarana dan prasarana.



Gambar 4.1 Pelaksanaan Kurikulum di Daerah 3T

2. Pemahaman Kurikulum

Sasaran akhir dari penerapan kurikulum adalah satuan pendidikan dalam hal ini adalah guru kelas maupun guru mata pelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, seorang guru diharapkan memahami dan mengerti apa yang dimaksud di dalam kurikulum tersebut. Penerapan kurikulum yang saat ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan telah dipahami dan dimengerti oleh 67 persen aparat dinas pendidikan di tiga kabupaten dan 33 persen lainnya belum benar-benar memahami dan mengerti isi dari kurikulum. Hal ini menunjukkan bahwa perlu berbagai upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun

daerah untuk mensosialisasikan kurikulum yang berlaku khususnya Kurikulum 2013.



Gambar 4.2 Pemahaman Pelaksanaan Kurikulum di Daerah 3T

3. Sarana dan Prasarana Pendukung Kurikulum

Keberhasilan dalam mengimplementasikan kurikulum pada satuan pendidikan di daerah 3T tidak lepas dari faktor pendukung yaitu sarana dan prasarana yang dimiliki oleh setiap satuan pendidikan. Sampai saat ini kurang lebih 67 persen aparat dinas pendidikan menyatakan bahwa sarana dan prasarana cukup memadai dan selebihnya 33 persen menyatakan belum memadai. Hal ini menunjukkan bahwa untuk dapat menyeimbangkan kualitas pendidikan di daerah 3T maka perlu disiapkan sarana dan prasarana yang

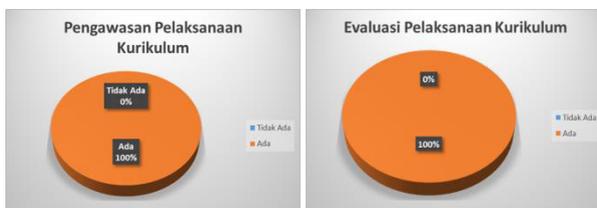
memadai. Kemudahan akses untuk menggunakan sarana pembelajaran sangat diperlukan.



Gambar 4.3 Sarana dan Prasarana Pendukung Kurikulum di Daerah 3T

4. Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum

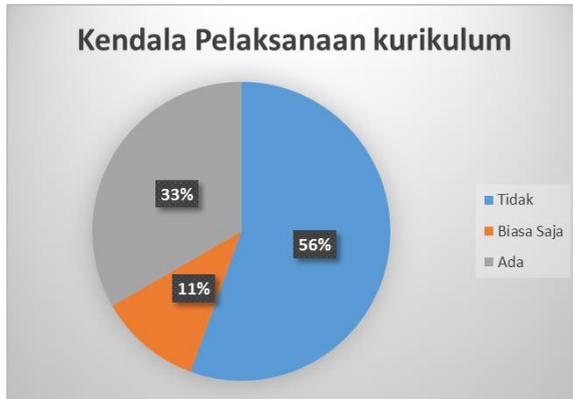
Dinas pendidikan di setiap kabupaten memiliki tugas di antaranya adalah mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum yang berjalan di wilayahnya masing-masing. Hal ini telah dilaksanakan oleh masing-masing instansi dengan baik dan harus terus dilaksanakan secara berkesinambungan.



Gambar 4.4 Pengawasan dan Pelaksanaan Kurikulum di Daerah 3T

5. Kendala Pelaksanaan Kurikulum

Setiap program dalam pelaksanaannya tidak selamanya berjalan dengan baik, begitu pula halnya dengan pelaksanaan kurikulum di daerah 3T. Guru sebagai pelaksana dari kurikulum baik KTSP maupun K-13 juga merasakan hal ini. Berdasarkan hasil evaluasi yang secara kontinu dilakukan oleh dinas pendidikan, 56 persen menyatakan tidak ada kendala dalam pelaksanaan kurikulum, 33 persen menyatakan ada kendala pelaksanaan kurikulum dan selebihnya menganggap pelaksanaan kurikulum biasa-biasa saja. Hal ini menyatakan bahwa hanya separuh yang sudah dapat melaksanakan kurikulum dengan lancar dan selebihnya masih memerlukan bantuan.



Gambar 4.5 Kendala Pelaksanaan Kurikulum di Daerah 3T

C. Kondisi Satuan Pendidikan di Daerah 3T

1. Keberadaan Ruang Kantor

Sebagai unit kegiatan pembelajaran, satuan pendidikan atau sekolah sudah selayaknya memiliki ruang khusus untuk melaksanakan kegiatan manajemen sekolah. Ruang khusus yang biasa digunakan adalah ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang guru maupun ruang untuk kegiatan konseling siswa. Di beberapa kabupaten di daerah 3T terlihat hanya 66,6 persen sekolah memiliki ruang guru, 11,1 persen memiliki ruang tata usaha bimbingan konseling, dan 77,7 persen ruang kepala

sekolah. Dari gambaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah tidak memiliki ruang yang memadai sehingga berbagai kegiatan di sekolah dilakukan di ruang bersama. Hal ini akan berdampak kepada ketidakteraturan pengelolaan administrasi sekolah.

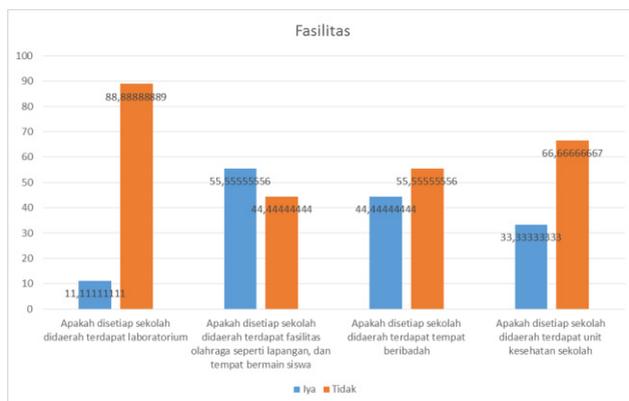


Gambar 4.6 Ketersediaan Ruang Kantor di Daerah 3T

2. Ketersediaan Fasilitas Sekolah

Fasilitas pendukung sekolah seperti fasilitas olah raga, tempat ibadah, dan UKS di daerah 3T hanya dimiliki oleh sebagian sekolah saja yaitu 66,6 persen saja, sedangkan 33,3 persen belum memiliki. Untuk fasilitas laboratorium hampir semua sekolah (88,8%)

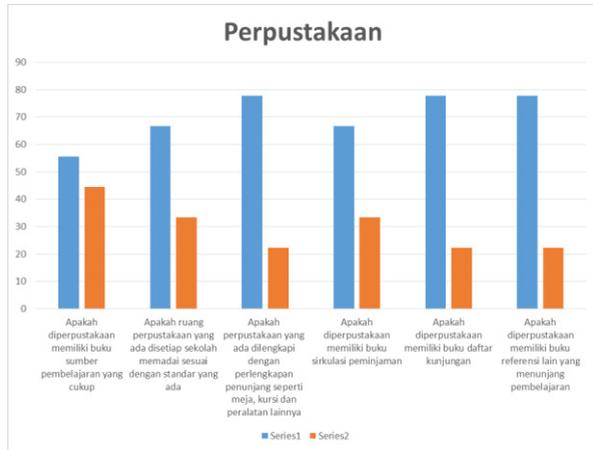
belum ada. Khusus fasilitas laboratorium, untuk yang paling sederhana belum dimiliki sehingga dalam pembelajaran menggunakan alam sekitar dan ruang kelas sebagai laboratorium.



Gambar 4.7 Ketersediaan Fasilitas di Daerah 3T

3. Ketersediaan Perpustakaan

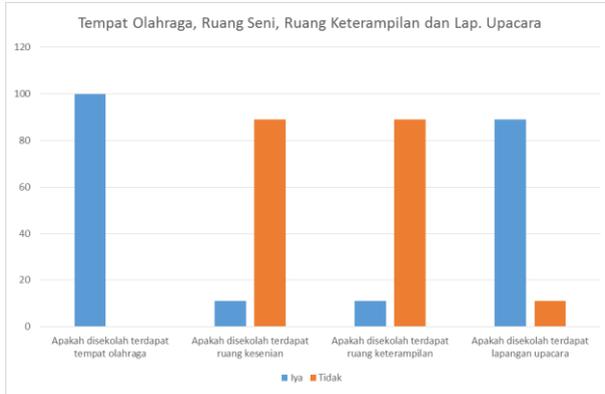
Perpustakaan sebagai sarana penunjang utama dalam sistem pendidikan. Pada umumnya setiap satuan pendidikan telah memiliki fasilitas perpustakaan dengan koleksi buku bacaan dan dikelola dengan baik. Hal ini terlihat dari dimilikinya buku sirkulasi dan daftar pengunjung perpustakaan yang menunjukkan aktifnya fasilitas perpustakaan di setiap satuan pendidikan.



Gambar 4.8 Ketersediaan Fasilitas Perpustakaan di Daerah 3T

4. Ketersediaan Fasilitas Ruang Ekstrakurikuler

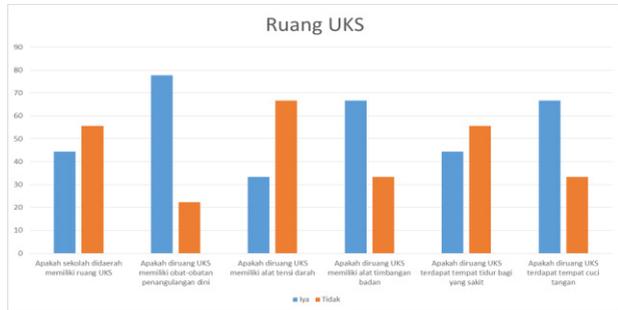
Untuk memfasilitasi minat dan bakat siswa, maka sekolah diharapkan memiliki beberapa fasilitas penunjang di antaranya ruang ekstrakurikuler. Dari beberapa ekstrakurikuler terlihat bahwa seluruh satuan pendidikan memiliki tempat olah raga dan upacara, minimal adalah halaman sekolah yang dapat dijadikan sarana olah raga. Untuk ruang kesenian dan keterampilan pada umumnya satuan pendidikan di daerah 3T tidak memiliki, karena masih banyak sekolah yang belum memiliki ruang untuk guru apalagi untuk ruang ekstrakurikuler.



Gambar 4.9 Ketersediaan Fasilitas Ruang Ekstrakurikuler di Daerah 3T

5. Ketersediaan Fasilitas Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Fasilitas UKS di setiap satuan pendidikan di daerah 3T terbilang masih sedikit jumlahnya. Jika ada, peralatan penunjang yang dimiliki juga masih terbilang sangat minim sebatas pada obat-obatan P3K dan alat timbangan badan yang dimiliki. Untuk fasilitas lain seperti timbangan badan, tensimeter dan tempat tidur tidak tersedia di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kesehatan sekolah masih kurang. Oleh sebab itu pemerintah daerah dapat mengupayakan ketersediaan fasilitas tersebut.



Gambar 4.10 Ketersediaan Fasilitas Ruang UKS di Daerah 3T

6. Ketersediaan Kantin Sekolah

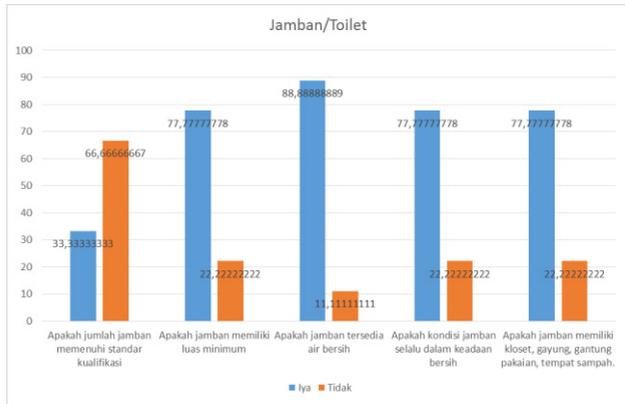
Masa pendidikan dasar merupakan masa di mana anak-anak mengalami tumbuh kembang yang sangat pesat sehingga memerlukan asupan makanan yang bergizi. Kegiatan sekolah yang dimulai sejak pagi hingga siang hari memungkinkan siswa untuk jajan. Oleh sebab itu, diharapkan setiap sekolah memiliki kantin sekolah yang sehat. Berdasarkan data hanya sebagian kecil sekolah yang memiliki kantin sekolah dengan kondisi yang apa adanya dan makanan yang disediakan jauh dari makanan yang sehat. Hal ini sangat meprihatinkan karena kondisi seperti ini memungkinkan siswa untuk berpeluang mengalami gangguan kesehatan karena jajanan tersebut.



Gambar 4.11 Ketersediaan Fasilitas Kantin Sekolah di Daerah 3T

7. Ketersediaan Toilet Sekolah

Fasilitas penting lainnya adanya toilet sekolah yang bersih dan sehat. Fasilitas toilet pada umumnya tersedia di sekolah dengan kualifikasi standar yang minimal yang meliputi luas toilet, ketersediaan air bersih, dan perlengkapan minimal toilet seperti gayung, gantungan pakaian, dan tempat sampah. Fasilitas ini sudah disadari kebutuhannya hanya masih jauh dikatakan baik.

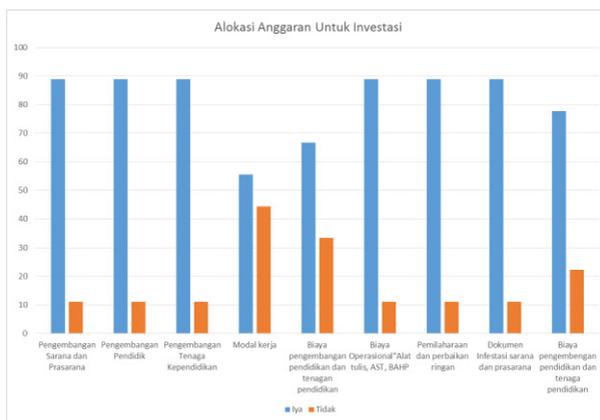


Gambar 4.12 Ketersediaan Fasilitas Toilet Sekolah di Daerah 3T

8. Alokasi Anggaran

Untuk melaksanakan program pembelajaran, sebagian besar satuan pendidikan telah melaksanakan pengalokasian anggaran baik untuk pengembangan sarana prasarana, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, modal kerja dan peralatan pembelajaran. Walaupun begitu, masih ada sebagian kecil sekolah yang tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Hal ini karena minimnya dana yang dimiliki sekolah. Untuk itu perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan kepala sekolah untuk memperhatikan sekolah-sekolah

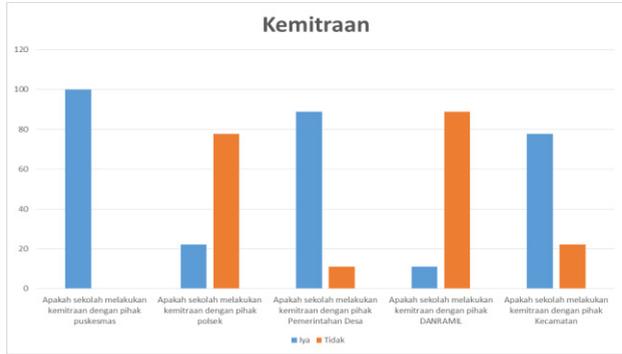
tersebut. Selain itu kepala sekolah harus lebih kreatif untuk mendapatkan dana berupa hibah atau swadaya.



Gambar 4.13 Alokasi Anggaran Investasi di Daerah 3T

9. Kemitraan

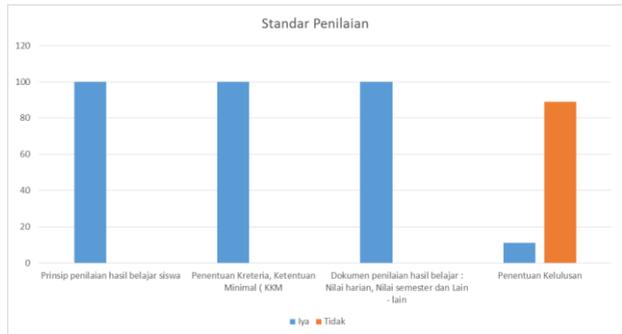
Program kemitraan sekolah dengan instansi lain di luar sekolah pada umumnya telah dilakukan. Adapun instansi yang menjadi mitra adalah instansi pemerintah terbatas pada Puskesmas, pemerintah desa dan kecamatan. Sedangkan untuk menjaga keamanan sekolah dan siswa, hanya sebagian kecil sekolah yang telah melakukan kerja sama tersebut.



Gambar 4.14 Kemitraan Sekolah di Daerah 3T

10. Standar Penilaian

Standar penilaian pada umumnya telah dijalankan oleh setiap satuan pendidikan tentunya atas arahan dari dinas pendidikan kabupaten.



Gambar 4.15 Standar Penilaian di Daerah 3T

D. Penilaian Masyarakat

1. Kecocokan Kurikulum dengan Keadaan Masyarakat

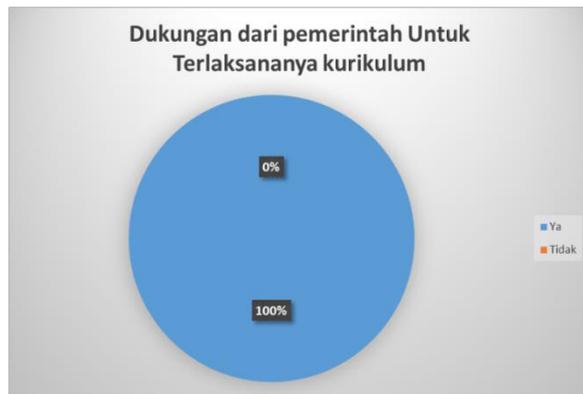
Implementasi kurikulum yang ada saat ini tentu secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ternyata hanya 10 persen masyarakat yang menyatakan kecocokan kurikulum dan mudah menjalankannya, 50 persen menyatakan biasa saja dan 40 persen menyatakan sulit. Artinya kurikulum yang ada masih dirasa belum cocok untuk keadaan masyarakat setempat karena dampaknya tidak dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.



Gambar 4.16 Kecocokan Kurikulum dengan Keadaan Masyarakat di Daerah 3T

2. Dukungan Pemerintah

Kurikulum yang dilaksanakan di setiap satuan pendidikan adalah kurikulum yang diturunkan dari pemerintah pusat dan daerah, maka satuan pendidikan merasakan penuh dukungan dari pemerintah dalam pelaksanaannya.



Gambar 4.17 Dukungan Pemerintah di Daerah 3T

3. Tambahan Kurikulum Muatan Lokal

Kurikulum yang ada saat ini dirasakan masyarakat masih belum mencukupi, oleh sebab itu perlu ditambahkan kurikulum muatan lokal yang berupa *life skill* dan penanaman nilai kearifan lokal yang dirasa sudah terkikis. Sebagian masyarakat (54%) merasakan perlunya tambahan kurikulum muatan lokal tersebut,

dan 11 persen merasa kurikulum yang ada tidak perlu ditambah dengan muatan lokal.



Gambar 4.18 Tambahan Kurikulum di Daerah 3T

4. Kurikulum Muatan Lokal

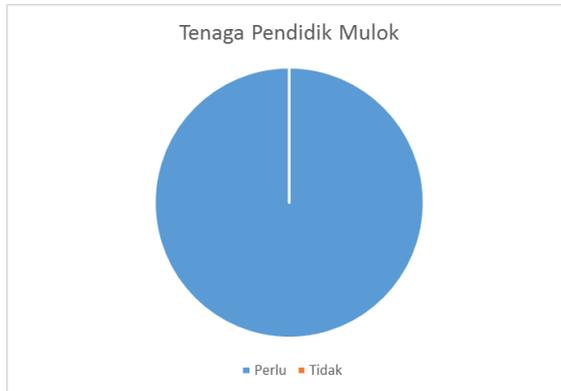
Sebagian besar daerah 3T adalah daerah dengan letak geografis memiliki area laut, maka masyarakat menginginkan untuk pelajaran keterampilan dalam muatan lokal yang menunjang mata pencaharian daerah 3T yaitu budi daya dan pengolahan hasil laut. Hal ini akan sangat membantu perekonomian masyarakat dan sebagai bekal keterampilan yang langsung bermanfaat untuk keluarga.



Gambar 4.19 Muatan Lokal Kelautan di Daerah 3T

5. Kompetensi Tenaga Pendidik

Untuk mencapai kompetensi siswa terhadap muatan lokal berbasis kearifan lokal sangat diperlukan tenaga pendidik yang memang memahami dan kompeten tentang budaya dan potensi daerah, adat istiadat serta nilai-nilai kearifan yang berlaku di daerah tersebut.



Gambar 4.20 Kompetensi Tenaga Pendidik Mulok di Daerah 3T

6. Kurikulum Muatan Lokal

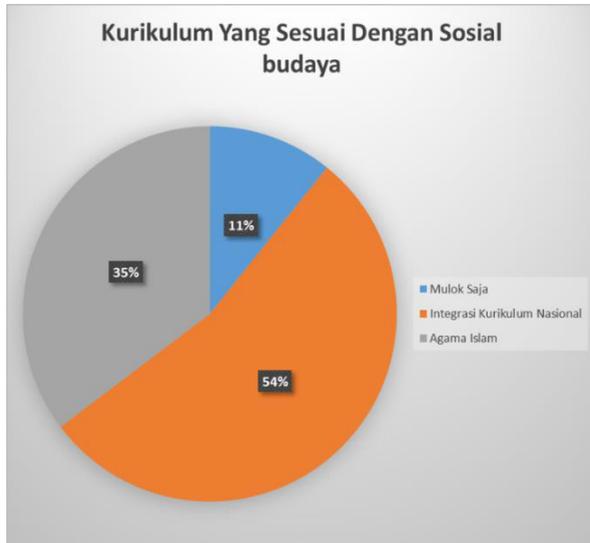
Daerah 3T selain memiliki potensi daerah berupa kelautan juga daerah-daerah tersebut merupakan daerah agraris dan merupakan mata pencaharian dari sebagian masyarakatnya. Oleh sebab itu, muatan lokal yang tepat adalah muatan lokal yang mendukung *life skill* pertanian (77%).



Gambar 4.21 Kurikulum Mulok di Daerah 3T

7. Kesesuaian Kurikulum dengan Sosial Budaya Daerah

Harapan masyarakat kurikulum yang perlu ditambah konten atau isi dari kurikulum yang sudah ada yaitu kurikulum yang mengakomodir nilai-nilai agama dalam setiap mata pelajaran (54%) dan hanya 11 persen yang memasukkan sosial budaya daerah dalam bentuk Mulok. Hal ini memungkinkan karena masyarakat menganggap nilai-nilai agama yang dapat menjadi pedoman hidup anak-anaknya dalam setiap langkah yang selama ini sudah mulai menurun kualitasnya dengan adanya penetrasi dari budaya luar.



Gambar 4.22 Kesesuaian Kurikulum dengan Sosial Budaya di Daerah 3T

8. Mulok Pertanian

Untuk pilihan Mulok pertanian, beberapa jenis Mulok yang mendukung dapat diterapkan kepada siswa adalah pertanian palawija dan budi daya pertanian. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa Mulok pertanian palawija adalah yang tepat untuk siswa di mana tidak memerlukan lahan yang luas untuk praktikum dan dapat diterapkan di halaman rumah masing-masing.



Gambar 4.23 Hasil Pemilihan Mulok di Daerah 3T

E. Pembahasan Hasil Instrumen

Kurikulum yang berjalan saat ini walaupun dalam pelaksanaan tidak menghadapi kendala berarti serta guru dengan mudah melaksanakannya, tetapi kearifan lokal yang diharapkan oleh masyarakat belumlah sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dianggap kesalahan pemerintah yang membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetapi tidak konsisten mengembangkan budaya tiap-tiap daerah. Seperti telah diketahui bahwa masing-masing daerah memiliki keunikan serta kearifan lokal sendiri yang harus tetap dipertahankan. Selama ini muatan budaya kearifan lokal yang mencakup sosial budaya, kesenian, nilai-nilai adat istiadat

sudah mulai menurun kualitasnya serta generasi muda sudah tidak memahami budaya yang selama ini dianut oleh orang tuanya.

Kurikulum 2013 yang sebenarnya sudah hampir dapat mengakomodir dalam pengembangan kearifan lokal terkendala kurangnya SDM yang memadai untuk menanamkan nilai adat istiadat di Lombok Timur. Saat ini guru yang akan mengajar di sekolah tidak dibekali oleh pengetahuan dan wawasan budaya tempat calon guru akan mengajar sehingga untuk implementasi kearifan lokal sangat terbatas. Kearifan lokal saat ini hanya diimplementasikan melalui mata kuliah seni budaya dan prakarya. Itu pun sebatas pada pembuatan produk seni khas daerah tersebut. Padahal keutamaan kearifan lokal adalah tertanamnya nilai-nilai budaya dan adat istiadat setempat sehingga akan melekat terus pada generasi muda. Sedangkan orang yang memahami mengenai nilai-nilai budaya pada umumnya adalah tokoh-tokoh adat yang bukan guru di sekolah. Ditemui juga beberapa sekolah yang memberikan muatan lokal dengan Bahasa Inggris atau Komputer untuk siswanya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kearifan lokal Lombok Timur. Bahasa Inggris adalah bahasa asing bukan bahasa lokal setempat. Sebaiknya Mulok mengangkat bahasa dan budaya lokal.

Kurikulum perpaduan Kurnas dengan agama. Model pembelajaran setelah sekolah siswa diharuskan mengikuti kegiatan kearifan lokal keagamaan. Dengan kondisi geografis dan kearifan lokal maka kebijakan dalam pengelolaan kelas menurut sekretaris dinas yaitu sarana prasarana memerlukan biaya besar karena kontur tanah yang rawa-rawa sehingga bangunan cepat rusak. Kendala pendidikan di daerah 3T, yaitu: 1) Fasilitas masih minim; 2) Kualitas/kompetensi guru masih rendah; 3) Komitmen guru yang masih kurang.

Pelatihan yang diadakan oleh pusat yang tidak tuntas sehingga guru kurang memahami hasil pelatihan dan tidak mampu menerapkan di sekolah akhirnya kembali ke cara atau model tradisional. Kompetensi lulusan di kurikulum terlalu tinggi sehingga susah tercapai untuk daerah.

Muatan kurikulum terlalu banyak. Pendamping guru yang TOT kurang menguasai sehingga malah membingungkan guru-guru. Guru kebingungan masalah penilaian di kurikulum baru (K-13). Balitbang membuat standar penilaian yang sederhana tapi sesuai harapan. Pengadaan buku yang terlambat menyulitkan guru dalam mencari bahan dan sumber belajar. Revisi buku yang tidak final sehingga membingungkan guru-guru. Sebagian sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum memahami kurikulum yang ada. Perlu tenaga ahli IT

setiap sekolah 1 orang. Mengadakan pelatihan yang *best practise* untuk guru-guru.

Rendahnya guru-guru dalam penguasaan alat pembelajaran. Pembelajaran berbasis lingkungan dengan kearifan lokal yang religius sehingga pembelajaran ada keterpaduan dengan keagamaan. Perlu adanya pelatihan kepada guru-guru mengenai model-model pembelajaran yang mudah diaplikasikan sehingga pembelajaran efektif dan efisien.

Wilayah perairan sehingga guru perlu diberikan pelatihan tentang perikanan, perkapalan sederhana supaya guru bisa mengajarkan kepada siswa sesuai karakteristik daerah. Mengharapkan pemerintah menyekolahkan siswa anak daerah untuk belajar teknik perikanan dan perkapalan sehingga putra daerah bisa membangun daerahnya.

Standar kompetensi lulusan harus fleksibel jangan disamakan dengan sekolah perkotaan. SDM masih sangat kurang kualitasnya. Model pembelajaran berbasis lingkungan (keagamaan). Bahan dan sumber belajar yang sangat kurang. Kurikulum disesuaikan dengan kearifan lokal. Masih kekurangan tenaga pendidik.

F. Pengembangan Model

Berdasarkan hasil analisis data dan juga FGD yang dilakukan di daerah, didapatkan model pembelajaran yang dapat dilaksanakan untuk pembelajaran di daerah 3T, adapun model yang diajukan berdasarkan temuan hasil penelitian adalah model penyelenggaraan pendidikan untuk daerah 3T yang mengakomodir keberagaman kondisi lingkungan sosial dan budaya setempat (berbasis kearifan lokal) yang mengedepankan prinsip “ASICT” (*Assimilated and Accomodated, Supporting of, Innovative Thinking, Comprehensif and Technologycal Used*).

Model ini pada dasarnya adalah pengembangan model penyelenggaraan pendidikan yang sama seperti penyelenggaraan yang telah dilakukan sebelumnya, akan tetapi lebih mengedepankan prinsip-prinsip “ASICT” tersebut. Prinsip ini muncul berdasarkan hasil uji coba dan juga data yang didapatkan pada saat proses diskusi dan juga FGD selama proses penelitian. Dengan ditemukannya prinsip ini, diharapkan proses pembelajaran dan pengajaran yang dilaksanakan di daerah 3T dapat berlangsung secara optimal.

1. Prinsip Asimilasi dan Akomodasi

Skema adalah kerangka mental yang digunakan untuk mengatur pengetahuan. Skema sebagai struktur data yang mewakili pengetahuan yang tersimpan dalam memori. Skema menghasilkan slot, yang berperan sebagai isi memori yang mempunyai bermacam-macam nilai. Dengan kata lain, pengetahuan akan diterima, dikodekan, disimpan, dan dimaknai sesuai dengan slot di mana ia ditempatkan (Bruning, dkk, 2004:48). Sejalan dengan pendapat Bruning, dkk, Desmita (2012:102) mengungkapkan bahwa skema (struktur kognitif) adalah proses atau cara mengorganisasi dan merespon berbagai pengalaman. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa skema sangat mempengaruhi individu dalam memperoleh pengetahuan.

Piaget (Upton, 2012:24), berpendapat bahwa pengetahuan dibangun melalui dua proses, yaitu asimilasi dan akomodasi. Berikut akan dijelaskan masing-masing proses tersebut.

a. Asimilasi

Asimilasi adalah proses di mana anak mengevaluasi dan mencoba memahami informasi baru, berdasarkan pengetahuan dunia yang sudah dimiliki (Upton, 2012:24). Selanjutnya menurut Desmita (2012:103), asimilasi merupakan perubahan objek eksternal menjadi struktur pengetahuan internal. Proses asimilasi ini didasarkan atas kenyataan bahwa setiap saat manusia selalu mengasimilasi informasi-informasi yang sampai kepadanya, di mana kemudian informasi-informasi tersebut dikelompokkan ke dalam istilah-istilah yang sebelumnya sudah mereka ketahui. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asimilasi adalah proses yang mana individu mengintegrasikan antara persepsi, konsep atau pengalaman baru ke dalam skema kognitifnya.

Asimilasi dapat juga diartikan sebuah proses penyatuan budaya yang berbeda dengan tujuan untuk mengurangi perbedaan yang ada serta mencapai kepentingan bersama. Asimilasi bisa dikatakan sebagai salah satu proses peleburan dua

kebudayaan untuk menunjang satu tujuan. Berbeda dengan akulturasi yang berjalan secara alami atau natural, proses asimilasi berjalan dengan adanya usaha-usaha yang nyata dari kedua pemegang budaya. Untuk dapat memahami lebih lanjut, pahami juga mengenai faktor-faktor yang mempermudah serta yang menghambat asimilasi. Untuk dapat mendalami lebih lanjut mengenai pengertian asimilasi kebudayaan, berikut beberapa faktor pendorong terjadinya asimilasi yang perlu anda ketahui:

1. Toleransi

Toleransi merupakan salah satu faktor pendorong yang utama dalam pembentukan asimilasi. Rasa saling menghargai antarsesama budaya akan membuat para penerima kebudayaan menjadi terbuka, sehingga dua kebudayaan dapat dengan mudah berjalan bersama, atau bahkan melebur bersama menjadi satu budaya. Selain itu dapat meminimalisir perpecahan karena perbedaan kebudayaan yang ada.

2. Persamaan dalam Unsur Kebudayaan

Memiliki budaya yang serupa namun tak sama akan mempermudah proses asimilasi, karena masyarakat dapat melihat keunggulan kebudayaan yang lain dan kemudian menerapkannya dalam kebudayaannya sendiri.

3. Perkawinan Campuran

Seperti yang kita ketahui perkawinan campuran merupakan salah satu contoh penyatuan dua kebudayaan dalam lingkup individu. Dengan menikahi orang yang berbeda kewarganegaraan dengan kita berarti kita telah siap untuk menerima segala perbedaan yang ada termasuk perbedaan budaya. Namun, untuk membangun suatu rumah tangga yang harmonis, biasanya pasangan akan menyatukan budaya mereka masing-masing agar hubungan mereka selalu baik.

b. Akomodasi

Akomodasi adalah proses di mana anak memperluas dan memodifikasi representasi-

representasi mental mereka tentang dunia berdasarkan pengalaman-pengalaman baru (Upton, 2012:24). Sedangkan Hergenhahn (2010:326) mengungkapkan bahwa akomodasi adalah pertumbuhan progresif dari struktur kognitif yang mengubah karakter dari semua proses belajar selanjutnya. Lebih lanjut Desmita (2012:103) berpendapat bahwa akomodasi adalah mengubah struktur kognitif yang telah dimiliki sebelumnya untuk disesuaikan dengan objek stimulus eksternal.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa akomodasi adalah proses kognitif individu dalam menghadapi stimulus yang masuk ke dalam struktur kognitifnya. Proses akomodasi dapat terjadi dalam dua hal yaitu mengubah skema yang ada dalam struktur kognitif individu karena pengalaman yang ia temukan tidak ada dalam struktur berpikir individu atau individu bisa memodifikasi skema yang ada sehingga cocok dengan stimulus yang masuk ke dalam diri individu.

Dalam prinsip asimilasi dan akomodasi ini guru harus bisa memiliki kemampuan untuk mengasimilasikan proses pembelajaran kurikulum nasional dengan mengadaptasikan kearifan lokal daerah setempat untuk memudahkan proses transfer pengetahuan kepada siswa dalam rangka pemenuhan standar kompetensi lulusan guna tujuan nasional pendidikan Indonesia, yang menjadi manusia Indonesia seutuhnya dengan tanpa mengindahkan kearifan lokal serta budaya setempat.

2. Prinsip *Supporting*

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun (Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan di bawah supervisi dinas pendidikan kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK. Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB di bawah supervisi dinas pendidikan provinsi.

Berdasarkan amanat dari Undang-Undang Sisdiknas tersebut maka dukungan dari berbagai pihak terkait dengan proses pembentukan manusia Indonesia yang utuh, bermartabat, bermoral dan berwawasan luas, diharapkan tidak hanya dari pemerintah saja, akan tetapi juga berasal dari masyarakat sekitarnya.

Selain dukungan pun keharmonisan antara *stakeholder* yang mendukung proses pembelajaran, karena keharmonisan antara *stakeholder* tersebut akan sangat berpengaruh dalam proses penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T ini. Masyarakat daerah sekitar pun harus peduli terhadap penyelenggaraan pendidikan dan lembaga pendidikan pemerintah yang ada di sekitarnya. Jangan menyalahkan semua pemenuhan standar nasional harus dipenuhi oleh pemerintah, hal ini dirasakan juga akan menghambat proses penyelenggaraan pendidikan. Sehingga prinsip *supporting* ini akan mempengaruhi model penyelenggaraan di daerah 3T ini.

Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa: "Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah". Kemudian pada Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, menyebutkan bahwa: "Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus".

Pernyataan tersebut di atas telah menunjukkan kesungguhan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif dalam hal ini adalah daerah 3T di negara tercinta ini yang perlu ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman teknis serta serangkaian kegiatan yang dapat mendukung implementasi pendidikan inklusif.

Kita sadari bahwa dalam mengimplementasikan pendidikan di daerah 3T, banyak faktor yang harus dipertimbangkan, antara lain: a) Kebijakan hukum dan perundang-undangan; b) Sikap, pengalaman dan pengetahuan; c) Tujuan pendidikan nasional dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; d) Perubahan paradigma pendidikan (manajemen berbasis sekolah, otonomi pendidikan, desain pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar); e) Adaptasi lingkungan, penciptaan kerja, dan pemilik perusahaan; dan f) Kerja sama kemitraan (pemerintah, sekolah, orang tua, masyarakat).

Faktor-faktor tersebut di atas saling berkaitan dan saling ketergantungan antara satu faktor dengan faktor yang lainnya. Implementasi pendidikan inklusif sangat tergantung pada sikap, pengetahuan, fleksibilitas dan kemampuan kreatif untuk memecahkan masalah dan mendesentralisasikan pengambilan keputusan hingga kepada individu guru, orang tua, dan peserta didik berkebutuhan khusus.

Kerja sama kemitraan pada berbagai level akan sangat penting. Pentingnya peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang

berkualitas telah dikemukakan sebelumnya, perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mendasarinya di level nasional sudah kuat dan jelas dari Departemen Pendidikan Nasional. Hal ini tidak menghalangi bantuan dari departemen-departemen lain, seperti departemen sosial, departemen tenaga kerja dan departemen kesehatan dalam memberikan bantuan yang diperlukan peserta didik berkebutuhan khusus.

Kerja sama antara guru-guru antar sekolah di daerah 3T diperlukan dalam upaya meningkatkan pembelajaran anak. Kerja sama antara guru dan orang tua serta kerja sama orang tua di antara para orang tua itu sendiri akan memperkaya semua yang terlibat serta akan menjamin pendidikan di daerah 3T yang lebih baik lagi dan lebih bermakna. Kerja sama dengan masyarakat seperti tokoh-tokoh masyarakat, organisasi-organisasi penyandang cacat, organisasi-organisasi sosial lainnya, dalam berbagai bidang sangat diperlukan dan akan memberikan pengayaan dalam implementasi pendidikan di daerah 3T.

Pada hakekatnya pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, masyarakat, dan

pemerintah. Oleh sebab itu, para pembina dan pelaksana pendidikan di lapangan diharapkan mampu memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan secara optimal. Partisipasi dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T antara lain dalam hal: a) Perencanaan; b) Penyediaan tenaga ahli/profesional terkait; c) Pengambilan keputusan; d) Pelaksanaan pembelajaran dan penilaian; e) Pendanaan; f) Pengawasan, dan penyaluran lulusan. Untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat diakomodasikan melalui wadah: a) komite sekolah; b) Dewan pendidikan; dan c) Forum-forum/persatuan peduli atau pemerhati pendidikan di daerah 3T.

3. Prinsip *Innovative Teaching and Learning*

Inovasi dapat dijabarkan sebagai proses untuk memperkenalkan ide baru, barang baru, pelayanan baru dan cara-cara baru yang lebih bermanfaat.

Inovasi atau *innovation* berasal dari kata *to innovate* yang mempunyai arti membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Inovasi kadang pula diartikan sebagai penemuan, namun berbeda

maknanya dengan penemuan dalam arti *discovery* atau *invention* (invensi). *Discovery* mempunyai makna penemuan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu telah ada sebelumnya, tetapi belum diketahui. Sedangkan invensi adalah penemuan yang benar-benar baru sebagai hasil kegiatan manusia. Anna Poejadi (2001) memberikan penjelasan: Secara harfiah *to discover* berarti membuka tutup. Artinya, sebelum dibuka tutupnya, sesuatu yang ada di dalamnya belum diketahui orang. Sebagai contoh perubahan pandangan dari geosentrisme menjadi heliosentrisme dalam astronomi. Nicolaus Copernicus memerlukan waktu bertahun-tahun guna melakukan pengamatan dan perhitungan untuk menyatakan bahwa bumi berputar pada porosnya, bahwa bulan berputar mengelilingi matahari dan bumi, bahwa planet-planet lain juga berputar mengelilingi matahari. Kesalahan besar yang ia lakukan adalah bahwa ia yakin semua planet (termasuk bumi dan bulan) mengelilingi matahari dalam bentuk lingkaran. Penemuan ini menggugah Tycho Brahe melakukan pengamatan lebih teliti terhadap gerakan planet. Data pengamatan kemudian membuat Johannes Kepler akhirnya mampu merumuskan hukum-hukum gerak planet yang tepat.

Penemuan ketiga tokoh tersebut merupakan "discovery". Sedangkan *invent* yang dalam kamus didefinisikan sebagai menciptakan sesuatu yang baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Contoh *invention* adalah penemuan Thomas Alva Edison (1847-1931), yaitu penemuan perekam suara elektronik, penyempurnaan mesin telegram yang secara otomatis mencetak huruf mesin, mesin piringan hitam, dan pengembangan bola lampu pijar.

Inovasi diartikan penemuan dimaknai sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang baik berupa *discovery* maupun invensi untuk mencapai tujuan atau untuk memecahkan masalah tertentu. Dalam inovasi tercakup *discovery* dan invensi.

Kata kunci lainnya dalam pengertian inovasi adalah baru. Santoso S. Hamijoyo dalam Cece Wijaya dkk (1992:6) menjabarkan bahwa kata baru diartikan sebagai apa saja yang belum dipahami, diterima atau dilaksanakan oleh si penerima pembaharuan, meskipun mungkin bukan baru lagi bagi orang lain. Akan tetapi, yang lebih penting dari sifatnya yang baru adalah sifat kualitatif yang berbeda dari sebelumnya. Kualitatif berarti bahwa inovasi itu

memungkinkan adanya reorganisasi atau pengaturan kembali dalam bidang yang mendapat inovasi.

Kita berada di tengah-tengah samudera hasil inovasi. Ada inovasi: pengetahuan, teknologi, ICT, ekonomi, pendidikan, sosial, dan sebagainya. Inovasi dapat dikelompokkan pula atas inovasi besar dan inovasi kecil-kecil namun sangat banyak. Inovasi itu tidak harus mahal. Inovasi itu dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja. Kalau leluhur kita tidak inovatif, kita semuanya akan tetap tinggal di gua-gua, dalam kegelapan, tanpa busana.

Inovasi dapat menjadi positif atau negatif. Inovasi positif didefinisikan sebagai proses membuat perubahan terhadap sesuatu yang telah mapan dengan memperkenalkan sesuatu yang baru yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Inovasi negatif menyebabkan pelanggan enggan untuk memakai produk tersebut karena tidak memiliki nilai tambah, merusak cita rasa dan kepercayaan pelanggan hilang.

Dalam bidang pendidikan, banyak usaha yang dilakukan untuk kegiatan yang sifatnya pembaharuan atau inovasi pendidikan. Inovasi yang terjadi dalam bidang pendidikan tersebut, antara lain: dalam hal

manajemen pendidikan, metode pengajaran, media, sumber belajar, pelatihan guru, implementasi kurikulum, dan sebagainya.

Berikut ini adalah beberapa contoh inovasi pendidikan yang telah dilakukan oleh Depdiknas selama beberapa dekade terakhir ini, yaitu: Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP), Sistem Pengajaran Modul, Guru Pamong, Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), dan sebagainya.

Contoh kegiatan inovasi pendidikan tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP)

Proyek ini bertujuan untuk mencoba bentuk sistem persekolahan komprehensif dengan nama “Sekolah Pembangunan”.

b. Pengajaran dengan Sistem Modul

Sistem pengajaran ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belajar-mengajar di sekolah, terutama yang berkaitan dengan penggunaan waktu, dana, fasilitas, dan tenaga secara tepat guna dalam mencapai tujuan secara optimal.

c. Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA)

Pendekatan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) menuntut keterlibatan mental siswa terhadap bahan yang dipelajari. CBSA adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Pendekatan CBSA menuntut keterlibatan mental yang tinggi, sehingga terjadi proses-proses mental yang berhubungan dengan aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Melalui proses kognitif, pembelajar akan memiliki penguasaan konsep dan prinsip.

Dalam bidang kurikulum pun inovasi tetap dilakukan dalam rangka pembaharuan informasi dan pengetahuan yang akan disampaikan pada peserta didik. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan.

Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut.

Lama waktu dalam satu kurikulum biasanya disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari sistem pendidikan yang dilaksanakan. Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh.

Dalam bidang metode pembelajaran, inovasi pun berkembang dengan pesat seiring juga dengan perkembangan kebutuhan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa pada saat ini. Adapun pengembangan metode yang diharapkan dapat diterapkan pada daerah 3T ini adalah sama dan cenderung lebih inovatif ketimbang pada daerah umum lainnya, karena memang pada daerah 3T ini perlu ada perlakuan khusus yang dimunculkan oleh guru dalam rangka menjalankan proses pembelajarannya di dalam kelas.

Inovasi dalam bidang sarana dan prasarana harus mengacu pada tupoksi lembaga dan peraturan perundangan yang berlaku yaitu UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 dan Standar Nasional Pendidikan PP 19 Tahun 2005 yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran (termasuk diklat) termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan di daerah 3T.

4. Prinsip *Comprehensive Assessment*

Assessment atau penilaian merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan dapat ditempuh

melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas penilaiannya. Penilaian (*assessment*) pendidikan perlu dilakukan secara profesional karena:

- a) Hasil penilaian pendidikan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan berbagai keputusan tentang siswa, proses pembelajaran, kurikulum dan kebijakan pendidikan;
- b) Perlunya upaya membangun pendidikan bermutu dan bermakna, hasil penilaian menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan dan perbaikan mutu pendidikan. Oleh karena itu pelaksanaan kegiatan pendidikan perlu untuk secara berkala dinilai untuk memperoleh informasi yang berguna bagi pengambilan kebijakan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Meningkatkan mutu pendidikan adalah sebagai upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, meningkatkan daya saing masyarakat dan bangsa, meningkatkan martabat pribadi, masyarakat dan bangsa serta mewujudkan kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan hidup masyarakat dan bangsa.

Assessment adalah proses untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk membuat keputusan tentang peserta didik, kurikulum dan program, dan

kebijakan pendidikan. Keputusan tentang peserta didik mencakup manajemen pembelajaran kelas, penempatan peserta didik dalam tipe program pendidikan berbeda, penugasan yang tepat, bimbingan konseling, seleksi untuk kesempatan pendidikan, sertifikasi kompetensi, dan lain-lain. Keputusan tentang kurikulum dan program mencakup efektivitas (*summative evaluation*) dan cara meningkatkan mereka (*formative evaluation*). Keputusan tentang kebijakan pendidikan mencakup kebijakan yang dibuat oleh sekolah maupun dinas pendidikan nasional, provinsi, kabupaten sampai tingkat terendah kecamatan sesuai dengan otoritas masing-masing (Nitko, Anthony J, 2001).

Apabila kita menilai kompetensi peserta didik maka informasi yang dikumpulkan adalah informasi tentang tingkat pencapaian belajar peserta didik terhadap target yang ditetapkan. Berbagai teknik penilaian dapat digunakan untuk itu mencakup observasi formal maupun informal seperti tes tertulis, pekerjaan rumah, tugas laboratorium, tugas penelitian, pertanyaan verbal dan analisis catatan peserta didik dan lain-lain. Lebih spesifik definisi *assessment* yang dikemukakan oleh

Weeden, Winter, Broadfoot, 2002; Bott, 1996 dan Nitko, 1996; Mardapi, 2004) yaitu proses pengumpulan informasi tentang kinerja siswa, untuk digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan. Selanjutnya Black dan William (1998) mendefinisikan penilaian sebagai semua aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk menilai diri mereka sendiri, yang memberikan informasi untuk digunakan sebagai umpan balik untuk memodifikasi aktivitas belajar dan mengajar. Stiggins (1994) mendefinisikan *assessment* sebagai penilaian proses, kemajuan dan hasil belajar siswa (*outcome*). Sementara itu *assessment* diartikan oleh Kumano (2001) sebagai “*The process of collecting data which shows the development learning*”. The Task Group on Assessment and Testing (TGAT) mendeskripsikan *assessment* sebagai semua cara yang digunakan untuk menilai unjuk kerja individu atau kelompok (Griffin & Nix, 1991:3).

Dengan sistem evaluasi yang baik maka akan mendorong pendidik untuk menentukan strategi mengajar yang baik sehingga dapat memotivasi peserta didik untuk belajar dengan lebih baik lagi untuk mencapai tujuan pembelajaran dan tujuan

pendidikan seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia.

Oleh karena itu, evaluasi merupakan penilaian program pendidikan secara menyeluruh dan bersifat makro. Evaluasi program menelaah komponen-komponen yang saling berkaitan tentang perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Sementara *assessment* merupakan penilaian dalam *scope* yang lebih sempit (bersifat mikro) yaitu menyangkut kompetensi siswa dan perbaikan program pembelajaran. Subjek *assessment* adalah siswa seperti kompetensi lulusan dan perbaikan cara belajar siswa, sedangkan subjek evaluasi lebih luas dan beragam seperti siswa, guru, materi, perangkat pembelajaran, organisasi, lingkungan, dan lain-lain. Lebih khusus di daerah 3T *comprehensive assessment* diperlukan, karena menetapkan keberhasilan belajar peserta didik dari beberapa bidang kajian terkait yang dipadukan. Dalam kaitan ini guru selain dituntut untuk menyediakan teknik dan prosedur penyelenggaraan pelaksanaan penilaian dan pengukuran yang komprehensif, juga

dituntut untuk berkoordinasi dengan guru lain bila materi pelajaran berasal dari guru yang berbeda.

5. Prinsip *Technological Used*

Melalui pemanfaatan teknologi pendidikan kita dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu dengan cara membuka lebar-lebar terhadap akses ilmu pengetahuan dan penyelenggaraan pendidikan bermutu. Terutama penerapan *high tech* dan *high touch approach*. Sistem teknologi informasi dalam pendidikan memberi jangkauan yang luas, cepat, efektif, dan efisien terhadap penyebaran informasi ke berbagai penjuru dunia. Teknologi informasi berkembang sejalan dengan perkembangan teori komunikasi dan teknologi yang menunjang terhadap praktik kegiatan pembelajaran. Pembelajaran berbasis multimedia seperti Pembelajaran Berbasis Komputer (PBK), pembelajaran berbasis web (*e-learning*), merupakan bentuk pemanfaatan TIK yang perlu dilaksanakan dalam dunia pendidikan dewasa ini.

Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang paling pokok dalam keseluruhan proses pendidikan. Hal ini berarti bahwa pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses

pembelajaran dirancang dan dijalankan secara profesional, seperti saat ini, dengan dimanfaatkannya Teknologi Informasi dan Komunikasi, khususnya komputer dan internet dirasa sangat membantu dalam kegiatan pembelajaran.

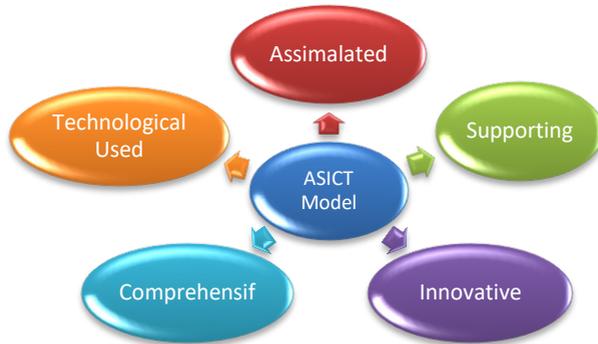
Salah satu permasalahan pendidikan yang menjadi prioritas untuk segera dicari pemecahannya adalah masalah kualitas pendidikan, khususnya kualitas pembelajaran. Dari berbagai kondisi dan potensi yang ada, upaya yang dapat dilakukan berkenaan dengan peningkatan kualitas pendidikan adalah dengan mengembangkan teknologi pembelajaran yang berorientasi pada *interest* peserta didik dan memfasilitasi kebutuhan akan pengembangan kognitif, efektif, dan psikomotornya.

Seiring dengan perkembangan teknologi pendidikan berikut infrastruktur penunjangnya, upaya peningkatan mutu pendidikan di atas antara lain dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi pendidikan tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Teknologi pendidikan merupakan suatu sistem yang dapat memfasilitasi pendidik dan peserta didik belajar lebih luas, lebih banyak dan juga bervariasi. Melalui fasilitas yang

disediakan oleh sistem tersebut, siswa dapat belajar mandiri, kapan dan di mana saja tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Bahan yang dapat mereka pelajari juga lebih bervariasi, tidak hanya dalam bentuk sajian kata, tetapi dapat lebih kaya dengan variasi teks, visual, audio, dan animasi.

Untuk itu, sudah seyaknyalah pada pendidik harus mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang humanis, yaitu kondisi pembelajaran yang menyenangkan dengan mengoptimalkan peran teknologi pembelajaran khususnya untuk pendidikan di daerah 3T.

Proses penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada di sekitar sekolah/masyarakat untuk menghindarkan ketertinggalan informasi dan pengetahuan dari pusat atau wilayah lain. Hal ini diharapkan bisa mendukung proses pembelajaran di daerah tersebut dengan mengoptimalkan teknologi yang juga mendukung kearifan daerah tersebut.



Gambar 4.24 Model Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah 3T yang Mengakomodasi Keberagaman Kondisi Lingkungan, Sosial, dan Budaya Setempat (Berbasis Kearifan Lokal) yang Mengedepankan Prinsip “ASICT”

G. Uji Model

Uji model dilakukan di empat daerah yaitu, lokasi penelitian dilakukan pada sekolah di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Manggari Nusa Tenggara Timur, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. Dari data hasil uji coba model dilakukan sebagai dasar menentukan kebijakan dalam model maka didapat sebagai berikut.

1. Pengujian Model

a. Pelaksanaan

Untuk menguji model dilaksanakan di salah satu Sekolah Dasar dengan menerapkan model ASICT.

b. Proses Pelaksanaan Model

Guru memberikan pembelajaran di kelas dengan tema lingkungan.

Prinsip *Asimilated*

Seorang guru harus mampu menjelaskan berbagai aspek yang terkait dengan lingkungan. Aspek kebersihan lingkungan rumah dalam lingkup kecil sangat penting dipahami oleh siswa di mana siswa diharapkan selalu membantu orang tua membersihkan rumah dan halaman. Selain itu berbicara tentang lingkungan, seorang guru mengaitkan dengan keindahan, karena lingkungan yang baik tidak lepas dari faktor keindahan yang akan diperoleh melalui penghijauan. Penghijauan bukan hanya urusan pemerintah tetapi juga di rumah. Pemanfaatan lahan yang ada untuk penghijauan penting dilakukan untuk menciptakan

udara yang bersih dan sejuk selain untuk mendapatkan keuntungan ekonomis.

Untuk menjelaskan materi dengan tema lingkungan, guru juga dapat menjelaskan pentingnya gotong royong masyarakat dalam satu lingkungan tempat tinggal untuk melakukan penghijauan, kerja bakti untuk kebersihan lingkungan dan lain-lain.

Tema lingkungan adalah tema yang sangat luas sehingga guru juga dapat menjelaskan materi tentang mata pencaharian masyarakat di daerahnya. Untuk daerah Lombok guru menjelaskan bahwa masyarakat Lombok memiliki mata pencaharian di bidang pertanian, kelautan dan pariwisata. Hal ini akan membuka wawasan siswa untuk mengembangkan diri nantinya dengan pekerjaan yang akan diminati.

Tema lingkungan juga membahas tentang kesehatan dalam suatu masyarakat, keluarga maupun individu. Pentingnya menjaga kesehatan individu bagi siswa dan keluarganya seperti kebiasaan mencuci tangan sebelum makan, mandi dan gosok gigi dua kali sehari, makan makanan

bergizi, berganti pakaian setiap hari dan sebagainya. Tema lingkungan juga dapat dikaitkan dengan kehidupan sosial masyarakat setempat di mana masing-masing daerah memiliki keunikan masing-masing sesuai dengan adat istiadat dan budayanya. Untuk menciptakan lingkungan yang sehat secara psikologis, setiap individu harus memiliki hubungan yang baik dengan orang lain karena manusia sebagai makhluk sosial di mana satu sama lain saling membutuhkan dan tidak dapat hidup sendiri.

Prinsip *Supporting*

Untuk melaksanakan pembelajaran, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak terkait. Sebagai contoh dalam pembelajaran dengan tema lingkungan. Karena guru yang ditempatkan sebagai guru yang memberikan materi tidak menguasai kearifan lokal di daerahnya, maka melibatkan tokoh masyarakat yang lebih mumpuni dalam penyampaian materi terkait adat istiadat dan nilai-nilai budaya. Selain yang terkait materi pembelajaran, tentunya ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan bukan hanya tanggung

jawab pemerintah saja tetapi dapat juga melibatkan masyarakat dan lembaga lain. Contohnya untuk praktikum pertanian yaitu bagaimana cara menanam padi, siswa dapat praktik di persawahan milik warga. Selain itu, untuk kelas yang lebih tinggi pengenalan IPTEK dilakukan di lembaga lain untuk membahas perangkat komputer karena sekolah belum memiliki perangkat komputer.

Untuk materi kesehatan, siswa didatangkan dokter Puskesmas untuk menjelaskan pentingnya mencuci tangan sebelum makan dan bagaimana menggosok gigi.

Prinsip *Innovative*

Sebagai seorang guru kemampuan untuk berkreasi sangat diperlukan karena dalam pelaksanaannya penempatan guru di sekolah belumlah pasti bahwa sekolah memiliki fasilitas yang memadai sebagai penunjang pembelajaran. Sedangkan materi yang diajarkan harus tercapai tujuan pembelajarannya. Kemampuan berinovasi guru sangat diperlukan dalam hal ini. Hal ini bertujuan menarik minat siswa dalam belajar, memudahkan siswa dalam

memahami suatu pelajaran dan membantu siswa dalam berimajinasi.

Dalam pelaksanaan pembelajaran berhitung, guru tidak boleh terpaku pada alat bantu yang tidak terdapat di sekolah tersebut. Berhitung perkalian cepat dapat diajarkan dengan menggunakan sepuluh jari yang pasti dimiliki oleh setiap siswa. Atau untuk menghitung penjumlahan, guru dapat memanfaatkan lidi atau kerikil yang ada di lingkungan sekitar sebagai alat bantu. Cara ini membuat siswa mudah dalam memahami perkalian dan penjumlahan. Hal ini akan lebih melekat dalam ingatan siswa.

Prinsip Comprehensive Assessment

Aspek ini adalah aspek penilaian yang dilakukan terhadap siswa dalam proses pembelajaran. Penilaian yang dilakukan guru bukan hanya hasil akhir pembelajaran tetapi juga proses pembelajaran. Selain itu penilaian juga menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor siswa yang selama ini diterapkan. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap materi pelajaran harus meresap dalam diri siswa. Model

pembelajaran yang dilakukan oleh orang tua zaman dulu dalam mengajarkan mengaji dapat diterapkan seperti mengulang-ulang ayat sampai hafal dan memberikan makna ayat tersebut dalam bentuk langgam yang dinyanyikan setiap kali pertemuan.

Prinsip Technological Used

Untuk daerah 3T yang pada umumnya lebih tertinggal dalam akses maupun sarana dan prasarana dibandingkan daerah lainnya yang ada di kota/kabupaten. Hal ini bukanlah menjadikan sebagai suatu kendala dalam pembelajaran. Seorang guru maupun sekolah dapat memanfaatkan teknologi yang dimiliki. Untuk guru di daerah 3T ternyata memiliki perangkat komunikasi yang cukup modern. Hal ini terlihat dari *handphone* yang dimiliki. Sedangkan setiap sekolah belum semua memiliki perangkat komputer. Hal ini bukan penghalang untuk tidak menerima informasi ataupun dalam melakukan *updating* materi pembelajaran. Selain itu informasi dari dinas maupun kementerian akan dapat dengan mudah diakses oleh guru.

c. Hasil

Dari hasil uji coba model diperoleh sebagai berikut:

- 1) Proses pembelajaran yang dilakukan guru lebih interaktif karena siswa dapat dengan mudah mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Materi pembelajaran lebih konkrit sehingga lebih mudah dipahami siswa.
- 2) Dari sisi guru, guru lebih mudah memberikan pemahaman kepada siswa, guru lebih melihat siswa sebagai individu yang memang berbeda satu sama lain sehingga tidak melihat siswa berdasarkan hasil akhir pembelajaran.
- 3) Kendala keterbatasan media dapat teratasi oleh guru karena guru lebih kreatif.
- 4) Materi pembelajaran yang diajarkan guru dapat mengikuti perkembangan yang ada.
- 5) Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat setempat lebih mudah ditransfer dengan bantuan tokoh masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil uji coba dan penelitian di lapangan dalam rangka mendapatkan model penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T yang mengedepankan kearifan lokal dapat disimpulkan:

1. Model yang dikembangkan dapat digunakan sebagai salah satu model alternatif di penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T.
2. Model penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T dengan kearifan lokal yang mengedepankan prinsip “ASICT” yang dikembangkan akan dapat mempercepat dan meningkatkan pencapaian kualitas pendidikan.
3. Pada model penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T dengan kearifan lokal yang mengedepankan prinsip “ASICT” ini peran *stakeholder* sesuai kewenangan dan kemampuan masing-masing sangat bermakna untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
4. Pada model penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T dengan kearifan lokal yang mengedepankan prinsip “ASICT”, ketersediaan berbagai komponen sistem

pendidikan dan keharmonisan hubungan kerja mempercepat dan meningkatkan pencapaian kualitas pendidikan.

B. Rekomendasi

1. Model penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T dengan kearifan lokal yang mengedepankan prinsip “ASICT” diharapkan dapat menjadi model alternatif dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah tertinggal.
2. Model penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T dengan kearifan lokal yang mengedepankan prinsip “ASICT” perlu diujicobakan di daerah lain selain daerah sampel dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Nazii Shaleh, *Pendidikan dan Masyarakat* (Yogyakarta: Sabda, 2001).
- Bryson, John M., *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organization* (San Fransisco: Jossey Bass, 2001).
- Dudung, A., dkk., *Model Pembelajaran Saintifik Mata Pelajaran IPS untuk Siswa SD di Daerah 3T*, Penelitian Dikti, (Jakarta, 2017).
- Dwiningrum, Siti Irene Astute, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- Gall, Meredith D. and Walter G. Borg, *Educational Research: An Introduction*, (New Jersey: Pearson Education, 2003).
- Nasution, *Sosiologi Pendidikan* (Bandung: Bumi Aksara, 2015).
- Pidarta, Made, *Perencanaan Pendidikan Partisipatori dengan Pedekatan Sistem* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Raharjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).
- Rodliyah, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di Sekolah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi* (Bandung: Pustaka Seti, 2015).

Saripudin, *Interpretasi Sosiologis dalam Pendidikan* (Bandung: Karya Putra Darwati, 2010).

https://www.kompasiana.com/deasymania/pemenuhan-pendidikan-di-daerah-terdepan-terpencil-dan-tertinggal_54f7b66fa333112e1f8b47ca.

MODEL PENDIDIKAN DAERAH 3T BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan wilayah yang luas dan heterogen, secara geografis maupun sosiokultural, memerlukan upaya yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan, di antaranya permasalahan pendidikan di daerah 3T (Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Permasalahan tersebut antara lain yang terkait dengan pendidik, seperti kekurangan jumlah guru (shortage), distribusi guru yang tidak seimbang (unbalanced distribution), kualifikasi guru di bawah standar (under qualification), kurang kompeten (low competencies), dan ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diajarkan (mismatched), angka partisipasi sekolah yang masih rendah, sarana prasarana yang belum memadai, dan infrastruktur untuk kemudahan akses dalam mengikuti pendidikan yang masih sangat kurang.

Daerah 3T memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan nasional dan keutuhan NKRI. Program-program tersebut merupakan sebagian jawaban untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan di daerah 3T. Pengembangan model pendekatan Model Penyelenggaraan Pendidikan Di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (D3T) yang Mengakomodasi Keragaman Kondisi Lingkungan Sosial dan Budaya Setempat (Berdasarkan Kearifan Lokal) pada jenjang Sekolah dimaksudkan untuk membantu mengatasi kekurangan kemampuan guru dalam memberikan materi pembelajaran, sekaligus mempersiapkan guru profesional yang tangguh, mandiri, dan memiliki sikap peduli terhadap sesama, serta memiliki jiwa pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa, agar dapat maju bersama mencapai cita-cita luhur.

Dari hasil uji coba dan penelitian di lapangan dalam rangka mendapatkan model penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T yang mengedepankan kearifan lokal dapat disimpulkan bahwa 1) model penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T dengan kearifan lokal yang mengedepankan prinsip "ASICT" yang dikembangkan akan dapat mempercepat dan meningkatkan pencapaian kualitas pendidikan, 2) model penyelenggaraan pendidikan yang mengedepankan prinsip "ASICT" ini peran stakeholder sesuai kewenangan dan kemampuan masing-masing sangat bermakna untuk peningkatan kualitas pembelajaran, dan 3) model yang mengedepankan prinsip "ASICT", ketersediaan berbagai komponen sistem pendidikan dan keharmonisan hubungan kerja mempercepat dan meningkatkan pencapaian kualitas pendidikan.

